

**ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KENAIKAN TIKET
DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU**

SKRIPSI



Oleh :

Nabilla Zahra Novianti
21045010030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL, BUDAYA, DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PARIWISATA
SURABAYA
2025**

ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KENAIKAN TIKET

DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

SKRIPSI



Oleh :

Nabilla Zahra Novianti
21045010030

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL, BUDAYA, DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI PARIWISATA

SURABAYA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KENAIKAN TIKET
DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

Disusun Oleh :

NABILLA ZAHRA NOVIANTI
NPM. 21045010030

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing


Joko Mijianto, S.Hut., M.Si
NIP. 199105122024061004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik


Dr. Gatur Suratnoaji, M.Si
NIP. 196804182021211006

HALAMAN PENGESAHAN REVISI HASIL UJIAN SKRIPSI

ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KENAIKAN TIKET
DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

Menyetujui,

Telah dipertahankan di hadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal

Pembimbing

Tim Penguji:
1. Ketua


Joko Mijiarto, S.Hut., M.Si
NIP. 199105122024061004


Joko Mijiarto, S.Hut., M.Si
NIP. 199105122024061004

2. Sekretaris


Garsione Agni Andrea S.Pd., M.Sc
NPT. 21219900221336

3. Anggota


Praja Firdaus N., M.Hub.Int
NI PPPK. 198807292024211018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik


Dr. Catur Suratnoaji, M.Si
NIP. 196804182021211006

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Zahra Novianti
NPM : 21045010030
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Pariwisata
Fakultas : Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka. Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 20 Oktober 2025

Yang memerlukan



Nabilla Zahra Novianti

21045010030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP KENAIKAN TIKET DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU”** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Joko Mijiarto, S.Hut., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat serta motivasi kepada penulis. Dan penulis juga banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik itu berupa moril, spiritual, maupun materiil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Catur Suratnoaji, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Dr. Yudiana Indriastuti, S.Sos., M.Si selaku Ketua program Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Seluruh Dosen-dosen Program Studi Pariwisata yang telah membimbing dan mendidik kami hingga berada pada tahap ini.
4. Pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Narasumber biro wisata, dan Narasumber wisatawan yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan keterangan dan informasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Yuni, selaku orang tua tercinta penulis yang menjadi sumber kekuatan penulis, semangat dan doa nya yang selalu menyertai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Kerja keras mama dan banyak nya uang yang dikeluarkan untuk skripsi penulis, selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan membuat bangga beliau. Alhamdulillah ya ma, 3 anak mama sudah sarjana semua.. Mama keren banget sebagai *single mom* bisa sekolahin ke-3 anaknya sampai sarjana walaupun mama sendiri hanya berakhir di SMA. Terimakasih banyak ya ma, Nabila sayang banget sama mama.

6. Zellya, Fanny, Mahathir dan Erda selaku saudara kandung dan saudara ipar tersayang penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan juga semangat untuk penulis di saat proses skripsi ini.
7. Keluarga dari pihak mama yang senantiasa memberikan bantuan dan juga motivasi kepada penulis dari awal hingga akhir jalannya skripsi ini.
8. Lail, Uyel, Alia, Lupi, Ican, Findo, Syifa, Rafi selaku sahabat penulis atau bisa dibilang rumah kedua di kehidupan penulis. Terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa skripsi ini dan masa-masa sebelumnya. Mungkin kalian tidak merasa bahwa kalian banyak andil dalam penulisan ini, tetapi dengan kehadiran kalian semuanya terasa cukup. *Thankyou for make it a real friends are exist.*
9. Anin, Isyna, Ayyasa, Fadia, Amel selaku anggota grup halo sekaligus sahabat penulis di masa perkuliahan ini. Terimakasih karena sudah hadir dan banyak membantu penulis dari semester 1 sampai di fase skripsi ini. Kehidupan kampus tidak seburuk itu karena ada kalian di kehidupan penulis.
10. Aes, Kemet, Ayak, Socil, Beki, Peha, Bungek, dan Intan selaku sahabat di bangku SMA yang telah bersama penulis selama bertahun-tahun, memberikan dukungan, dan juga kehadiran kalian disaat penulis pusing mengerjakan skripsi dan mengembalikan semangat penulis lagi.
11. Fore, Teazzi, Moeng dan juga Starbucks menjadi salah satu tempat perjuangan penulis untuk mengerjakan skripsi ini. Kalian enak bangett plisss love you!!
12. Seluruh teman-teman penulis yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar. Terimakasih atas kehadiran, *effort*, bahkan materi yang dikeluarkan untuk membantu penulis.
13. *Last but not least, i wanna thank to myself. For the hardwork, every sweats, every tears and every scars that go thru this life especially when i am doin this thesis. Last year i cant imagine hows my life this year, feels like i am drowning on a darkest hole in my life. But look at me now, i can survive. i got my sparks back, i met a lot of friends, i am enjoying my life doin something new. Thankyou for surviving this far Bila, you're doin great and you always will.*

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang penulis miliki semoga laporan ini dapat bermaanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis pada khususnya

Surabaya. 21 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN REVISI HASIL UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
Keywords: Ecotourism, stakeholder perceptions, Bromo Tengger Semeru.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. FOKUS PENELITIAN	8
1.3. TUJUAN PENELITIAN	8
1.4. KEGUNAAN PENELITIAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.2.2. Pariwisata	16
2.2.3. Persepsi Harga.....	17
2.2.4. Persepsi Para <i>Stakeholder</i>	18
2.4. KERANGKA PEMIKIRAN	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1. METODE PENELITIAN.....	21
3.2. PENDEKATAN PENELITIAN	21
3.3. BATASAN KONSEP PENELITIAN	22
3.4. LOKASI PENELITIAN.....	22
3.5. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	22
3.5.1 SUBJEK PENELITIAN.....	22
3.5.2. Objek Penelitian	25
3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	25
3.6.1 Observasi.....	26
3.6.2 Wawancara	26

3.6.3	Studi Dokumentasi	27
3.7.	TEKNIK ANALISIS DATA.....	27
3.7.1	Reduksi data	28
3.7.2	Penyajian data	28
3.7.3	Penarikan Kesimpulan	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		30
4.1	Hasil Penelitian	30
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	30
4.1.2	Daya tarik dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)	35
4.1.3	Dasar Kebijakan Kenaikan Tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	41
4.1.4	Implementasi kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2024 pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.	42
4.2.1	Kenaikan Harga tiket masuk di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	45
4.3	Pembahasan.....	65
4.3.1	Sejarah kenaikan harga di TNBTS dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 .	65
4.3.2	Analisis Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam PP Nomor 36 tahun 2024.....	70
4.3.3	Persepsi Pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.....	76
4.3.4	Persepsi Biro wisata terhadap kenaikan tarif tiket TNBTS	80
4.3.5	Persepsi wisatawan terhadap kenaikan tarif di TNBTS	85
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		90
DAFTAR PUSTAKA		92

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4. 1 Profil Narasumber	24
Tabel 4. 2 Jumlah Pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	71
Tabel 4. 3 Harga tiket masuk TNBTS setelah kenaikan tarif.....	73
Tabel 4. 4 Harga tiket masuk TNBTS sebelum kenaikan tarif.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1 Peta Kawasan Wisata TNBTS	32
Gambar 4.2 Pintu masuk dari arah Malang.....	34
Gambar 4.3 Gunung Bromo.....	36
Gambar 4.4 Grafik Kenaikan harga tiket di TNBTS	43
Gambar 4.5 Web <i>booking</i> tiket TNBTS	44
Gambar 4.6 Alur Pendaftaran <i>booking</i> tiket TNBTS	44
Gambar 4.7 Sosialisasi tiket TNBTS dengan beberapa <i>stakeholder</i>	48
Gambar 4.8 Wajib tiket <i>online</i> pada TNBTS	49
Gambar 4.9 Kronologi kejadian kericuhan di pintu masuk TNBTS jalur Probolinggo	52
Gambar 4.10 Kericuhan di pintu masuk TNBTS jalur Probolinggo.....	53
Gambar 4.11 Pemberlakuan sosialisasi terhadap wajib <i>booking</i> tiket <i>online</i> di web TNBTS	54

ABSTRAK

Sejak 30 Oktober 2024, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menerapkan penyesuaian tarif masuk kawasan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2024 sebagai pengganti regulasi lama dari tahun 2014. Kejakan ini di implementasikan dalam surat nomor PG.08/T8/TU/KSA.5.1/B/10/2024, yang secara tegas menetapkan tarif baru bagi pengunjung domestik dan mancanegara, serta untuk akses kendaraan dan aktivitas khusus seperti kunjungan, kemah, penggunaan drone, dan foto pre-wedding. Implementasi ini juga diiringi dengan perubahan prosedur teknis yang mencakup sistem pemesan tiket masuk secara daring. Alasan kenaikan yang tercantum dalam dokumen resmi PP No. 36/2024 disusun untuk menyesuaikan jenis dan tarif PNBP seiring perubahan struktur organisasi (penggabungan/penataan ulang kewenangan KLHK) dan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP sebagai sumber pembiayaan. Kedua, kenaikan tarif dipandang perlu untuk menutup biaya pengelolaan konservasi termasuk pengawasan, pemeliharaan infrastruktur jalur dan fasilitas wisata, pengendalian kerusakan lingkungan akibat kunjungan massal, serta pembiayaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan sehingga tarif bukan hanya sebagai sumber penerimaan tetapi juga instrumen pengelolaan pengunjung (visitor management). Hal ini membuat banyak persepsi dari berbagai *stakeholder* seperti pengelola, biro wisata dan juga wisatawan. Persepsi yang beragam dari para stakeholder terkait implementasi yang diterapkan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru harapannya bisa dijadikan alat pacuan kedepannya oleh pihak pemerintah selaku pembuat keputusan Undang-Undang.

Kata kunci : Ekowisata, persepsi *stakeholder*, Bromo Tengger Semeru

ABSTRACT

Since October 30, 2024, the Bromo Tengger Semeru National Park Office has officially implemented adjustments to the area's entrance fees based on Government Regulation Number 36 of 2024 as a replacement for the old regulation from 2014. This policy is implemented in letter number PG.08/T8/TU/KSA.5.1/B/10/2024, which explicitly stipulates new rates for domestic and international visitors, as well as for vehicle access and special activities such as visits, camping, drone use, and pre-wedding photos. This implementation is also accompanied by changes in technical procedures that include the online entrance ticket booking system. The reasons for the increase listed in the official document of Government Regulation No. 36/2024 are compiled to adjust the types and rates of PNBP in line with changes in the organizational structure (merger/restructuring of the authority of the Ministry of Environment and Forestry) and to optimize state revenue from PNBP as a source of financing. Second, the tariff increase is deemed necessary to cover conservation management costs, including supervision and maintenance of tourist trail infrastructure and facilities, mitigating environmental damage caused by mass visits, and financing conservation programs and empowering local communities around the area. This, in turn, makes the tariff not only a source of revenue but also a tool for visitor management. This has led to varying perceptions from various stakeholders, including managers, tourism agencies, and tourists. It is hoped that the diverse perceptions of stakeholders regarding the implementation of Bromo Tengger Semeru National Park will serve as a guiding principle for the government, as the decision-maker of the law.

Keywords: Ecotourism, stakeholder perceptions, Bromo Tengger Semeru

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki peluang besar dalam pengembangan industri pariwisata, sebab sektor ini tidak hanya berkembang pesat di tingkat nasional, tetapi juga sejalan dengan tren global. Pertumbuhan pariwisata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan devisa negara, melainkan juga berdampak pada pembukaan peluang usaha serta penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Tercatat pada tahun 2024, pariwisata Indonesia berhasil menyumbang devisa sebesar 25,4 triliun melalui berbagai kegiatan pemasaran baik di dalam negeri maupun luar negeri (Rahma, 2013).

Aktivitas pariwisata pada dasarnya berjalan apabila terdapat interaksi antara wisatawan dan destinasi wisata yang membentuk suatu sistem. Menurut Warpani (2006), sistem pariwisata terdiri atas dua sisi, yaitu sisi permintaan dan sisi penyediaan. Sisi permintaan mencakup masyarakat yang memiliki minat untuk berwisata, sedangkan wisatawan merupakan individu yang melakukan perjalanan wisata. Sementara itu, sisi penyediaan meliputi berbagai komponen seperti sarana transportasi, daya tarik wisata, pelayanan, serta kegiatan promosi dan informasi yang ditawarkan. Keseluruhan aspek tersebut membentuk produk destinasi wisata yang siap dipasarkan. Lebih jauh, industri pariwisata juga memiliki peran strategis dalam pengembangan sosial budaya sekaligus menjadi sarana promosi Indonesia di kancah internasional. Dengan kekayaan alam dan keragaman budaya yang dimiliki, sektor pariwisata Indonesia berpotensi menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Keindahan alam dan kekayaan seni budaya lokal menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, sehingga jika dikelola secara optimal dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan dunia.

Menurut Suwantoro (2004:19), daya tarik wisata pada umumnya ditentukan oleh beberapa faktor utama, yaitu adanya sumber daya yang mampu memberikan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih; tingkat aksesibilitas yang memudahkan wisatawan untuk berkunjung; keberadaan ciri khas atau spesifikasi tertentu yang

bersifat unik dan langka; serta tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang dapat melayani kebutuhan wisatawan.

Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi berkat keindahan lanskap pegunungan, sungai, pantai, pasir, hingga hutan, sedangkan objek wisata budaya memikat karena nilai-nilai khusus yang ditawarkan, baik berupa atraksi kesenian, upacara adat, maupun peninggalan karya manusia masa lampau. Dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata, Yoeti (2002) menjelaskan bahwa seluruh aktivitas dan usaha yang dilakukan bertujuan untuk menarik wisatawan serta menyediakan infrastruktur, sarana, barang, dan jasa yang diperlukan guna memberikan pelayanan yang memadai. Pengembangan pariwisata mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari transportasi, akomodasi, atraksi wisata, kuliner, cinderamata, hingga pelayanan umum.

Aktivitas ini berkontribusi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan internasional, yang pada gilirannya dapat meningkatkan dan memperkuat perekonomian nasional. Selain itu, pariwisata sekarang menjadi salah satu sektor terbesar di dunia dan berkontribusi besar terhadap PDB suatu negara. Menurut laporan World Tourism Barometer UNWTO, kedatangan wisatawan asing meningkat sebesar 4 persen pada tahun 2019, mencapai 1,5 miliar orang. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat sebesar 3 hingga 4 persen pada tahun 2020 (UNWTO, 2020). Selain itu, fakta ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Provinsi terbesar di Indonesia yaitu Jawa Timur. Tujuan destinasi wisatawan dari berbagai wilayah di dalam negeri maupun mancanegara salah satunya yaitu Jawa Timur. Menurut data resmi statistik BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Jawa Timur Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Agustus 2024 melalui pintu masuk Juanda sebanyak 38.587 kunjungan. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 12,02 persen dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli 2024 yang mencapai 34.446 kunjungan. Banyak destinasi yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan diantaranya yaitu situs bersejarah hingga tempat rekreasi alam seperti Pantai, danau, gunung berapi, dan wisata religi. Provinsi

Jawa Timur mempunya letak yang diuntungkan karena terletak di antara dua provinsi dengan kekayaan budaya yang paling terkenal di Indonesia yaitu Yogyakarta dan Bali.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan konservasi yang memiliki keunikan khas, yakni keberadaan lautan pasir yang membentang seluas kurang lebih 5.250 hektar, menjadikannya satu-satunya di Indonesia. Di dalam kawasan ini terdapat berbagai objek wisata alam, salah satunya adalah Kawasan Wisata Gunung Bromo (KWGB) yang dikenal memiliki fenomena alam menakjubkan dan daya tarik tinggi bagi wisatawan. Gunung Bromo sendiri termasuk ke dalam deretan lima gunung yang berada di kompleks Pegunungan Tengger. Sebagai gunung berapi aktif, Bromo tidak hanya menyimpan sejarah panjang mengenai proses alamiah terbentuknya, tetapi juga memiliki makna penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Tengger yang bermukim di sekitarnya (Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2006)

Gunung Bromo terletak di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dan merupakan salah satu Taman Nasional yang paling menarik dan mudah dikunjungi di Indonesia. Lokasi Gunung Bromo berada di ketinggian 1.000 hingga 3.676 meter di atas permukaan laut. Karena berkembangnya sektor pariwisata, taman wisata Gunung Bromo semakin dikenal oleh para pengunjung wisata. Untuk mendukung kunjungan wisatawan yang terus meningkat, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam bidang pariwisata. Dengan demikian, pembangunan pariwisata yang menyeluruh dan terintegrasi dapat berjalan lancar.

Sesuatu hal yang paling menarik di Gunung Bromo adalah statusnya yang masih gunung aktif, kemudahannya untuk didaki dan juga fenomena kawah Bromo di Tengah kaldera Gunung Tengger yang dikelilingi oleh hamparan Laut Pasir. Tahun 2007 sudah telah tercatat 52 kali letusan gunung api Bromo. Gunung Bromo pada saat kondisi aktif normal merupakan obyek wisata yang sangat menarik untuk dinikmati, namun saat terjadi erupsi/letusan, Gunung Bromo merupakan sumber potensi bahaya yang mengancam keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 2007)

Pengelolaan pariwisata di kawasan TNBTS menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung pembangunan sektor kepariwisataan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Andjani (2016) melalui survei dan wawancara dengan bantuan kuesioner terhadap wisatawan, pemilik usaha, serta tenaga kerja di kawasan wisata Gunung Pananjakan menunjukkan bahwa keberadaan TNBTS memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Wisata alam di kawasan ini terbukti mampu mendorong aktivitas ekonomi lokal, sehingga keberadaan objek wisata TNBTS berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (bromotenggersemeru.org, 2017). Besarnya manfaat ekonomi ini juga menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat lokal untuk terus menjaga kelestarian dan keindahan kawasan TNBTS agar tetap berkelanjutan.

Gunung Bromo sudah lama menjadi salah satu daya tarik utama di Jawa Timur dan menjadi sektor pariwisata terbesar di wilayah tersebut. Keindahan alamnya yang menakjubkan sehingga menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai destinasi unggulan, pemerintah dan pihak pengelola kawasan wisata Gunung Bromo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur di tempat ini. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kenaikan harga tiket masuk kawasan wisata. Kenaikan harga tiket pada Taman Nasional Gunung Bromo yang sebelumnya bagi wisatawan lokal hanya 29.000 rupiah naik menjadi 54.000 rupiah sedangkan untuk hari *weekend* 34.000 rupiah naik menjadi 79.000 rupiah. Langkah ini diambil tidak hanya untuk menaikkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata, tetapi juga menjadi salah satu dari strategi jangka panjang dalam menjaga kelestarian alam di sekitar Gunung Bromo. Dengan adanya kenaikan harga tiket, diharapkan pengelolaan kawasan wisata dapat berjalan lebih baik, termasuk dalam hal perawatan jalur wisata, pengelolaan sampah, dan pelestarian ekosistem yang ada. Selain itu, peningkatan harga tiket juga bertujuan untuk mengatur jumlah wisatawan yang datang agar tidak berlebihan.

Meningkatnya potensi pariwisata sebagai salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif serta berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini penting agar

pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kelestarian budaya serta kelangsungan lingkungan lokal. Menurut Sunaryo (2013), pengelolaan pariwisata dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan secara terencana oleh manusia dengan tujuan memperbaiki kondisi pariwisata yang dinilai kurang optimal, kemudian mengarahkannya menuju keadaan yang diharapkan. Dengan penerapan pengelolaan yang baik, perkembangan fasilitas, infrastruktur, dan layanan di destinasi wisata dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan wisatawan, tanpa mengabaikan ciri khas dan nilai-nilai lokal yang menjadi daya tarik utama pariwisata di Indonesia (Eddyono, 2021).

Daya tarik bukanlah hal utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan, faktor lokasi dan harga memegang peranan penting dalam memengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung. Penelitian yang dilakukan oleh Hussain dan Lueng (2017) mengenai beberapa acara di Sarawak, Malaysia, menunjukkan bahwa harga dan jarak lokasi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Harga yang kompetitif atau terjangkau dapat meningkatkan efektivitas strategi pemasaran, meskipun pada sisi lain, harga juga sering dijadikan indikator kualitas—di mana produk atau layanan yang berkualitas tinggi cenderung dihargai lebih mahal.

Penetapan harga oleh pengelola destinasi wisata menjadi aspek krusial karena persepsi wisatawan terhadap harga dapat memengaruhi niat kunjungan mereka. Menurut Kotler dan Keller (2016), terdapat enam faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, salah satunya adalah risiko finansial yang berkaitan dengan harga produk. Konsumen akan menukar nilai (harga) untuk memperoleh manfaat tertentu, dan pertukaran tersebut hanya dianggap memuaskan apabila nilai yang diterima sebanding atau lebih besar daripada nilai yang diberikan (Anggono & Sunarti, 2018). Oleh karena itu, strategi penetapan harga harus dirancang dengan cermat, memperhitungkan keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan wisatawan dan manfaat yang mereka peroleh.

Harga juga merupakan faktor determinan dalam pemasaran pariwisata karena berpengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan. Sirait (2018) menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan

berkunjung. Semakin terjangkau harga yang ditawarkan, semakin besar kemungkinan wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Dalam menyusun strategi harga, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti keterjangkauan, kesesuaian harga dengan pengalaman yang diberikan, daya saing harga, serta keseimbangan antara harga dan manfaat yang diterima oleh wisatawan.

Lokasi memiliki peranan yang sangat penting dalam industri pariwisata karena menjadi salah satu faktor penentu utama dalam perilaku konsumen. Pemilihan lokasi wisata memerlukan pertimbangan matang, karena lokasi yang strategis dan mudah diakses dapat mendorong konsumen atau wisatawan untuk melakukan kunjungan. Setiadi (2018) menegaskan bahwa lokasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Wisatawan cenderung memilih produk atau layanan wisata yang mudah dijangkau, baik dari segi aksesibilitas maupun sarana transportasi menuju dan dari lokasi wisata.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu destinasi unggulan yang terletak di wilayah administratif empat kabupaten, yaitu Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo. Akses menuju kawasan ini dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni melalui Malang dan Pasuruan. Pengembangan dan peningkatan kualitas akses lokasi wisata menjadi penting untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Potensi wisata yang dimiliki TNBTS memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi berbagai pihak, khususnya masyarakat lokal. Peningkatan kunjungan wisatawan ke kawasan ini membuka peluang ekonomi, seperti penyediaan jasa transportasi dan pengembangan usaha mikro di dalam atau sekitar kawasan taman nasional. Selain itu, kehadiran TNBTS juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga menawarkan daya tarik unik berupa bunga edelweiss (*Anaphalis spp*), yang dilaporkan oleh CNN Indonesia (2018) sebagai salah satu magnet wisata tersendiri, terutama bagi para pendaki. Bunga edelweiss dikenal sebagai simbol cinta abadi karena kemampuannya untuk

tidak layu selama bertahun-tahun. Daya tarik ini menjadikan edelweiss populer di kalangan wisatawan, bahkan sering dijadikan oleh-oleh atau buah tangan karena nilai simbolis dan keunikan bentuknya.

Peran pemerintah dalam pengembangan sektor pariwisata terletak pada penyusunan kebijakan serta perencanaan yang dilakukan secara sistematis dan terarah. Salah satu bentuk nyata dari peran tersebut adalah penyediaan serta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pariwisata, di samping upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di sektor ini agar mampu memberikan pelayanan optimal. Di sisi lain, sektor swasta sebagai pelaku bisnis memiliki kontribusi penting dalam penyediaan sarana penunjang pariwisata. Berbagai kebutuhan seperti restoran, fasilitas akomodasi, biro perjalanan, hingga layanan transportasi merupakan bagian dari sarana pendukung yang disediakan oleh pihak swasta untuk menunjang kelancaran aktivitas wisata (Yoety, 1997).

Pihak travel memiliki peran penting sebagai informan dalam analisis persepsi terhadap kenaikan harga tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Sebagai pelaku utama dalam industri pariwisata, khususnya dalam pengelolaan perjalanan wisata ke destinasi ini, mereka memiliki kedekatan langsung dengan wisatawan serta pemahaman yang mendalam tentang dinamika pasar. Pihak travel berperan menjadi penghubung utama antara wisatawan dan destinasi, sehingga mereka mampu menyampaikan secara langsung keluhan, tanggapan, atau antusiasme pengunjung terkait perubahan harga tiket. Melalui interaksi yang rutin dengan konsumen, pihak travel dapat mengidentifikasi tren persepsi wisatawan.

Wisatawan merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut. Sebagai pengguna akhir dari layanan wisata alam ini, persepsi wisatawan mencerminkan reaksi nyata terhadap perubahan biaya yang dikenakan, baik dalam bentuk kepuasan, keluhan, maupun penyesuaian perilaku berkunjung. Melalui wawancara, survei, atau observasi, data yang diperoleh dari wisatawan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana kenaikan harga tiket memengaruhi keputusan berwisata. Wisatawan juga dapat memberikan

persepsi tentang kualitas fasilitas, pelayanan, dan pengelolaan kawasan wisata setelah kenaikan harga. Setelah adanya penyesuaian harga. Dengan demikian, informasi yang diberikan oleh wisatawan tidak hanya penting untuk mengevaluasi dampak ekonomi, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan yang lebih kepuasan dan keberlanjutan wisatawan.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui persepsi *stakeholder*. Menurut Sumarto (2003), *stakeholder* dapat dipahami sebagai individu, kelompok, maupun organisasi yang mempunyai kepentingan, keterlibatan, atau terdampak baik secara positif maupun negatif dari suatu kegiatan atau program pembangunan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, terdapat tiga kelompok *stakeholder* utama yang saling berkaitan, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Rahim, 2012). Masing-masing pihak tersebut memiliki peran serta fungsi yang berbeda, sehingga pemahaman mengenai kontribusi dan tanggung jawab setiap *stakeholder* menjadi penting agar proses pengembangan pariwisata di suatu daerah dapat berjalan secara optimal dan terarah.

1.2. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian di sini adalah untuk mengetahui persepsi *stakeholder* terhadap kenaikan harga tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi *stakeholder* terhadap kebijakan kenaikan harga tiket masuk di Gunung Bromo.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian pariwisata, khususnya dalam aspek kebijakan harga tiket dan persepsi wisatawan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengelola wisata Gunung Bromo dalam mengembangkan kebijakan pariwisata berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek ekonomi dan konservasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berperan sebagai acuan atau pedoman bagi peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang akan diteliti. Dengan merujuk pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memahami konsep, metode, serta temuan yang telah ada, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan mengembangkan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan teori-teori serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti agar penelitian yang dilakukan memiliki landasan ilmiah yang kuat dan sistematis.

Beberapa jurnal terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Menurut Vebriana & Harti (2020) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh *Pengaruh Harga Tiket dan Fasilitas Terhadap Keputusan Berkunjung ke Obyek Wisata Ubalan Waterpark Mojokerto*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana daya tarik dan harga tiket memiliki peran yang sangat penting untuk menarik wisatawan dan membuat keputusan berkunjung di wisata Ubalan waterpark Mojokerto. Aspek yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah fokus utama pada penelitian ini yaitu pada penelitian ini berfokus pada persepsi *stakeholder* terhadap kenaikan harga tiket di TNBTS
2. Menurut Gusti Ayu Putu & I made (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *Persepsi biro perjalanan wisata terhadap kenaikan harga tiket masuk menuju taman nasional Bali Barat*. Para peneliti menggunakan Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara kuesioner, wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Aspek yang menjadi pembeda penelitian ini yaitu pada penelitian ini biro perjalanan wisata setuju terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan alasan konservasi

hutan, tetapi biro wisata mengharapkan adanya perubahan fasilitas umum yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Vebriana Fitria Sagita Sari & Harti tahun (2020)	Pengaruh harga tiket dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung ke obyek wisata Ubalan <i>waterpark</i> Mojokerto	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh harga tiket dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung ke obyek wisata Ubalan <i>waterpark</i> Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi keputusan berkunjung. Melalui Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, diperoleh pemahaman bahwa mayoritas wisatawan yang datang mempertimbangkan harga tiket sebagai salah satu faktor utama dalam menentukan obyek wisata. Harga yang dinilai terjangkau dan sesuai

		dengan layanan yang diberikan memberikan nilai tambah tersendiri bagi wisatawan yang datang. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan persepsi pengunjung terhadap harga dan kualitas fasilitas dengan keputusan berkunjung.
Gusti Ayu Putu & I Made Adikampana (2016)	Persepsi biro perjalanan wisata terhadap kenaikan harga tiket masuk menuju taman nasional Bali Barat	Sejumlah biro perjalanan wisata yang beroperasi di Kawasan Taman Nasional Bali Barat, dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga tiket masuk ke kawasan tersebut memunculkan beragam persepsi di kalangan pelaku industri pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata. Melalui pengumpulan data yang diambil dari observasi dan wawancara ditemukan bahwa sebagian besar biro perjalanan menilai kenaikan harga tiket membawa dampak

		langsung terhadap minat kunjungan wisatawan, baik maupun mancanegara. Kenaikan harga tiket menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi penurunan daya tarik wisatawan. Namun terdapat pula biro perjalanan yang melihat bahwa kenaikan harga dapat diterima selama disertai dengan transparansi pengelolaan dan adanya peningkatan fasilitas, konservasi alam, serta pelayanan kepada pengunjung.
Meyta Salsa Hardina & Eka Sudarusman (2021)	Pengaruh harga, Lokasi, dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung wisata Taman Sari di Yogyakarta	Hasil penelitian yang dilakukan di Taman Sari di Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa harga, lokasi dan fasilitas merupakan tiga faktor utama yang mempengaruhi keputusan wisatawan berkunjung. Persepsi pengunjung terhadap harga tiket masuk cukup positif, di mana harga dinilai terjangkau dan sepadan

		dengan pengalaman wisata. Hal ini menjadi salah satu daya tarik utama, terutama bagi wisatawan domestic dan pelajar yang memiliki keterbatasan anggaran tetapi ingin menikmati wisata sejarah dan budaya.
Laily Alfunnimah & Jamaludin Khalid (2020)	Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Horison Bekasi	Hasil penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tersebut mempengaruhi keputusan tamu untuk menginap di hotel tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tamu yang telah menginap di Hotel Horison Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga, lokasi, dan promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan tamu untuk menginap. Tamu cenderung memilih hotel berdasarkan harga yang sesuai dengan anggaran mereka, lokasi yang strategis, dan promosi yang

		menarik. Hal ini dapat membantu manajemen hotel dalam merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak tamu.
--	--	---

Sumber : Peneliti,2025.

2.2 LANDASAN KONSEPTUAL

2.2.1 Persepsi

Persepsi dapat dipahami sebagai cara pandang, pemahaman, serta penafsiran yang diberikan seseorang terhadap suatu objek berdasarkan informasi yang diterimanya. Proses ini menunjukkan bagaimana individu menilai, mengartikan, dan menginterpretasikan suatu informasi dengan mempertimbangkan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada dasarnya, persepsi muncul sebagai bentuk respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang memiliki sifat yang kompleks, kemudian diproses di dalam otak melalui mekanisme yang rumit hingga akhirnya melahirkan sebuah persepsi

Menurut Walgito, dalam proses persepsi individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterimanya, sehingga stimulus tersebut memperoleh makna bagi dirinya. Dengan demikian, stimulus memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya persepsi. Adapun hal-hal yang memengaruhi persepsi antara lain:

- A. objek yang dipersepsi di mana objek ini menghasilkan stimulus yang ditangkap oleh alat indera atau reseptör. Stimulus bisa bersumber dari luar diri individu maupun dari dalam, meskipun sebagian besar berasal dari luar; dan
- B. alat indera, saraf, serta pusat sistem saraf : Alat indera berfungsi menerima stimulus, sementara saraf sensoris bertugas meneruskan rangsangan tersebut ke pusat sistem saraf, yakni otak sebagai pusat kesadaran. Selanjutnya, untuk menghasilkan respon diperlukan saraf motoris yang bekerja sebagai penghubung dari proses tersebut.
- C. Perhatian: Untuk bisa mengenali atau memahami sesuatu, diperlukan perhatian. Perhatian ini adalah langkah pertama dan merupakan persiapan awal agar bisa terjadi pengamatan. Perhatian adalah fokus atau konsentrasi dari semua kegiatan seseorang yang dituju pada sesuatu atau sekelompok objek.

2.2.2. Pariwisata

Menurut Oka A. Yoeti (1982: 118), pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan selama waktu tertentu dari satu tempat ke tempat lain, bukan untuk bekerja atau mencari nafkah, melainkan untuk kesenangan, rekreasi,

atau pemenuhan berbagai keinginan pribadi. Suwantoro (2004: 3) menjelaskan bahwa pariwisata berkaitan erat dengan perjalanan wisata, yaitu perpindahan sementara seseorang dari tempat tinggalnya ke tempat lain, bukan untuk bekerja atau memperoleh penghasilan. Perjalanan ini bertujuan agar orang tersebut mendapatkan pengalaman yang menyenangkan serta memuaskan rasa ingin tahu terhadap sesuatu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata mencakup berbagai kegiatan wisata yang didukung oleh sarana dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, serta pemerintah daerah. Secara lebih luas, pariwisata juga dapat diartikan sebagai aktivitas wisata yang dilakukan oleh individu atau kelompok, dengan dukungan fasilitas dari pihak pengelola, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

2.2.3. Persepsi Harga

Menurut Shiffman dan Kanuk (2018), persepsi harga mengacu pada bagaimana seorang konsumen menilai suatu harga, apakah dianggap tinggi atau rendah. Pandangan ini berpengaruh besar terhadap niat dan keputusan seseorang dalam membeli suatu produk atau jasa. Sementara itu, Sudaryono (2014) menjelaskan bahwa persepsi harga erat kaitannya dengan bagaimana konsumen menerima dan memahami informasi mengenai harga suatu produk, sehingga mereka dapat memberikan makna yang lebih dalam terhadap nilai dari barang atau jasa yang akan dibeli. Dalam industri pariwisata, strategi penetapan harga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pengunjung dan pengelola destinasi wisata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi harga meliputi permintaan terhadap produk, pangsa pasar yang ditargetkan, reaksi kompetitor, strategi penetrasi harga, elemen pemasaran lainnya, biaya produksi atau pengadaan, serta strategi penetapan harga dalam lini produk (Payne 2000:174). Tjiptono dan Chandra (2017) mendefinisikan harga sebagai jumlah uang atau komponen nonmoneter tertentu yang dibutuhkan

untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Harga memiliki keterkaitan dengan konsep utilitas, yaitu kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk yang dimaksud bisa berupa barang, jasa, ide, lokasi, atau informasi yang dapat memberikan manfaat bagi pelanggan. Dalam konteks destinasi wisata, harga memegang peranan penting dalam menarik pengunjung dan mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung.

Tjiptono dan Chandra (2017) menyatakan bahwa peran harga terbagi dalam tiga aspek utama, yakni (1) dampaknya terhadap perekonomian secara makro, (2) pengaruhnya terhadap konsumen dalam pengambilan keputusan, dan (3) perannya bagi perusahaan dalam menentukan strategi bisnisnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi harga sangat berpengaruh dalam pengelolaan suatu destinasi wisata, baik dalam menentukan daya saing dengan kompetitor maupun dalam membantu wisatawan membandingkan harga antara berbagai destinasi. Dalam penelitian Kotler dan Keller (2009), keputusan wisatawan untuk berkunjung dikaitkan dengan pemilihan produk atau merek yang paling disukai oleh konsumen. Oleh karena itu, strategi penetapan harga harus dirancang dengan baik agar sesuai dengan ekspektasi wisatawan.

Penelitian sebelumnya oleh Hardina dan Sudarusman (2021) menunjukkan bahwa variabel harga memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lebu et al. (2019) menyatakan bahwa persepsi harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan wisatawan dalam memilih destinasi. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Sutopo (2016), yang menyimpulkan bahwa persepsi harga berdampak positif dan signifikan terhadap keputusan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke suatu destinasi wisata

2.2.4. Persepsi Para Stakeholder

Persepsi dapat diartikan sebagai pandangan atau pendapat individu berbeda-beda kepada objek yang sama. Kotler, Bowen, dan Makens (2002)

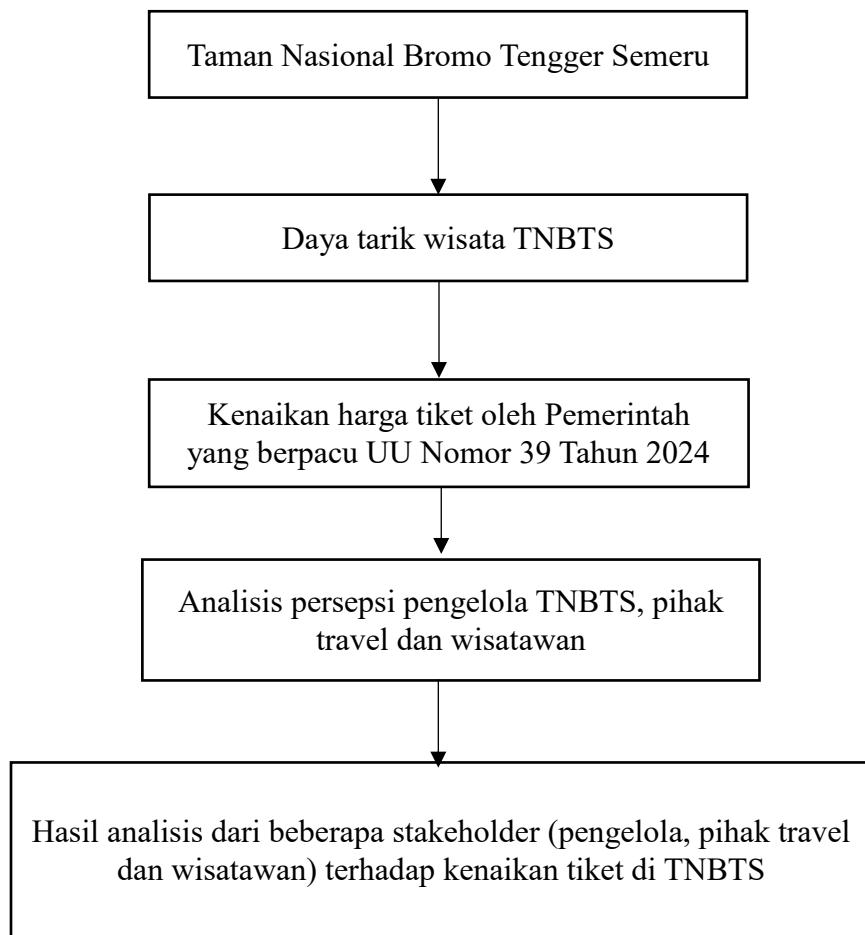
menjelaskan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan berbagai masukan informasi sehingga membentuk gambaran tertentu mengenai dunia di sekitarnya. Dengan kata lain, persepsi adalah cara individu membangun pemahaman atas lingkungannya berdasarkan informasi yang diterima.

persepsi tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan fisik yang ditangkap oleh indera, tetapi juga oleh faktor lingkungan sekitar serta kondisi internal individu itu sendiri (Fentri, 2017:4). Pride dan Ferrel dalam Fadila dan Lestari (2013:45) menambahkan bahwa persepsi melibatkan seluruh proses pemilihan, pengorganisasian, dan penafsiran informasi sensoris yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, maupun sentuhan, untuk kemudian menghasilkan makna tertentu.

Menurut Fentri (2017), persepsi wisatawan terhadap suatu destinasi dapat terbentuk dalam dua bentuk, yakni positif atau negatif. Persepsi ini menjadi salah satu faktor penting karena menentukan bagaimana wisatawan menilai, merasakan, dan memahami suatu objek wisata. Dengan demikian, persepsi wisatawan dapat dianggap sebagai pandangan atau interpretasi yang dibentuk berdasarkan pengalaman serta interaksi mereka dengan destinasi wisata yang dikunjungi.

2.4. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017: 92).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif, dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yakni pengelola Taman Nasional, biro atau agen perjalanan wisata, serta wisatawan yang sedang maupun telah berkunjung. Menurut Ahmad Tanzeh Suyitno (2006), pendekatan kualitatif umumnya digunakan dalam kajian ilmu sosial dan budaya karena penelitian jenis ini berfokus pada perilaku manusia serta makna yang terkandung di balik perilaku tersebut, yang sulit diukur menggunakan data numerik. Penelitian kualitatif berangkat dari pola pikir induktif dengan mengutamakan pengamatan objektif dan partisipatif terhadap fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Herdiansyah (2010) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah melalui interaksi dan komunikasi mendalam antara peneliti dengan objek yang diteliti. Moleong (2012) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif berusaha memahami pengalaman subjek penelitian secara menyeluruh—baik berupa perilaku, persepsi, motivasi, maupun tindakan—dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan ini menekankan pada konteks alamiah serta pemanfaatan berbagai metode naturalistik, sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta empiris, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai realitas sosial yang diteliti.

3.2. PENDEKATAN PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang gejala, fakta, atau peristiwa secara sistematis dan akurat berdasarkan karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu. Penelitian ini lebih berfokus pada deskripsi tanpa perlu mencari keterkaitan antar variabel maupun menguji hipotesis (Hardani *et al.*, 2020).

3.3. BATASAN KONSEP PENELITIAN

Batasan konsep penelitian ini berperan sebagai batasan konsep untuk peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, batasan konsep ditetapkan secara spesifik untuk mengarahkan fokus kajian pada persepsi berbagai pihak terhadap kebijakan kenaikan harga tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Penelitian ini dibatasi pada tiga kelompok utama yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan tersebut, yaitu: pihak pengelola TNBTS sebagai pelaksana kebijakan, pihak travel sebagai perantara antara destinasi dan wisatawan, serta wisatawan sebagai konsumen akhir dari produk wisata.

3.4. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang terletak Kabupaten Malang, Jawa Timur. Waktu penelitian diestimasikan dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2025. Waktu ini menyesuaikan dengan proses penyusunan proposal penelitian.

3.5. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

3.5.1 SUBJEK PENELITIAN

Moleong (2010:132) menjelaskan bahwa subjek penelitian dapat dipahami sebagai informan, yaitu individu yang dimanfaatkan untuk memberikan keterangan mengenai situasi dan kondisi lokasi penelitian. Sejalan dengan pandangan tersebut, Moeliono (1993:862) menyatakan bahwa subjek penelitian merupakan individu yang diamati dan dijadikan sebagai sasaran utama dalam kegiatan penelitian.

Pertama, dari sisi pihak pengelola TNBTS, analisis akan difokuskan pada bagaimana mereka menjelaskan bagaimana penerapan kebijakan kenaikan harga tiket, konservasi lingkungan, peningkatan fasilitas, serta Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana mereka menanggapi pro dan kontra dari para pemangku kepentingan lainnya.

Kedua, pihak travel dianalisis sebagai representasi dari pelaku usaha pariwisata yang terdampak langsung oleh kebijakan Peraturan Pemerintah

Nomer 39 Tahun 2024. Travel memiliki peran penting dalam mengemas dan memasarkan paket wisata ke Bromo, sehingga persepsi mereka sangat berkaitan dengan dinamika pasar. Dalam konteks ini, penelitian akan menggali apakah pihak travel menyetujui kenaikan harga tiket atau justru menolaknya, serta alasan yang mendasari sikap mereka.

Ketiga, wisatawan sebagai pengguna akhir menjadi fokus penting dalam menilai kebijakan kenaikan harga tiket yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2024 ini di tingkat masyarakat umum. Persepsi wisatawan merasa kenaikan harga tiket di TNBTS masih wajar atau justru terlalu mahal dan bagaimana kualitas pengalaman yang mereka dapatkan setara dengan biaya yang mereka keluarkan.

Penelitian kualitatif, aspek utama yang menjadi pertimbangan dalam proses pengumpulan data adalah pemilihan informan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Teknik sampling yang umumnya diterapkan adalah *purposive sampling*. Metode ini merupakan cara memilih informan atau narasumber secara sengaja berdasarkan tujuan tertentu yang relevan dengan tema penelitian, karena informan tersebut dinilai memiliki pengetahuan yang diperlukan. Dalam konteks ini, peneliti secara selektif menentukan informan yang dianggap memahami subjek penelitian serta mampu memberikan data dan informasi yang mendukung proses pengumpulan data (Kurniawan, 2014).

A. Syarat Informan dari Pihak Pengelola TNBTS

Pihak pengelola TNBTS dipilih sebagai informan utama yang mewakili sudut pandang institusional dan kebijakan dalam penelitian ini. Syarat informan dari pihak pengelola antara lain: Merupakan pegawai atau pejabat struktural di Balai Besar TNBTS, khususnya yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan tarif masuk. Memiliki pemahaman atau keterlibatan langsung terhadap proses penyusunan dan penerapan kebijakan kenaikan harga tiket, baik dalam aspek administratif, teknis, maupun komunikasi publik. Telah bekerja di lingkungan TNBTS

minimal 1 tahun, agar informan memiliki pengalaman dan perspektif yang cukup terhadap dinamika pengelolaan taman nasional. Bersedia memberikan keterangan secara terbuka dan objektif dalam wawancara.

Tabel 3.1 Profil Informan

No.	Nama Informan	Jabatan	Peran di Balai Besar TNBTS
1.	Haryanto	Humas	Penanggung jawab administrasi di Balai Besar TNBTS

Sumber : Penulis. 2025

B. Syarat Informan dari Pihak Travel

Pihak travel dipilih sebagai representasi pelaku industri wisata yang berinteraksi langsung dengan wisatawan dan menjadi perantara antara konsumen dan destinasi. Syarat informan dari pihak travel antara lain: Merupakan pemilik, pengelola, atau staf operasional dari biro perjalanan wisata yang aktif menyediakan paket wisata ke Bromo, minimal dalam 1 tahun terakhir.

Memiliki pengalaman dalam menjual atau memasarkan paket wisata ke TNBTS sebelum dan sesudah kebijakan kenaikan tiket diberlakukan, agar dapat membandingkan dampaknya. Paham mengenai respon atau perilaku wisatawan terhadap perubahan harga, baik dalam bentuk penurunan/kenaikan jumlah peminat, perubahan durasi kunjungan, maupun keluhan atau apresiasi pelanggan.

Tabel 3.2 Profil Informan biro wisata

No.	Nama Informan	Nama travel	Peran atau Tugas
1	Wildan	Ridy Tour and Travel	<i>Tour Guide</i>
2	Dedik	Slowhiking	<i>Owner</i>
3	Rizky	Eterna travelers	<i>Tour guide</i>

Sumber : Penulis, 2025

C. Syarat Informan dari Wisatawan

Wisatawan dipilih sebagai pengguna langsung dari layanan dan objek wisata TNBTS, sehingga persepsi mereka menjadi dasar penting dalam menilai keberterimaan publik terhadap kebijakan harga. Syarat informan dari wisatawan antara lain: Pernah melakukan kunjungan ke TNBTS setelah kebijakan kenaikan harga tiket diberlakukan (baik kunjungan pertama atau kunjungan ulang). Berusia minimal 17 tahun, agar dapat memberikan pendapat yang matang dan mandiri.

Bersedia diwawancara secara mendalam dengan lengkap dan jujur, serta bersedia menceritakan pengalaman pribadi selama berkunjung.

Tabel 3.3 Profil Informan wisatawan

No.	Nama Informan	Usia	Asal Daerah	Pekerjaan
1.	Ican	23 Tahun	Malang	Mahasiswa
2.	Nura	28 Tahun	Makassar	Pegawai Swasta
3.	Wahyu	22 Tahun	Jombang	Mahasiswa

Sumber : Penulis, 2025

3.5.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah aspek yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah penelitian, yaitu berupa substansi atau materi tertentu yang diteliti serta dijadikan fokus untuk menemukan jawaban atau solusi atas permasalahan yang diangkat. Objek penelitian di sini yaitu menganalisis persepsi berbagai pihak stakeholder terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penelitian ini menelaah persepsi pihak pengelola, pihak travel juga wisatawan dan pendapat wisatawan apakah bersifat positif atau negatif terhadap kenaikan harga tiket.

3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat, tidak memihak, dan lengkap yang sesuai dengan temuan penelitian. Peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data selama studi lapangan untuk memperoleh fakta, angka, dan informasi yang relevan.

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang faktual serta relevan dengan topik yang dikaji. Dalam proses ini, peneliti ikut terlibat dalam aktivitas sehari-hari individu yang diamati atau dijadikan sumber data penelitian (Sugiyono, 2008:65).

Alasan penggunaan observasi dalam penelitian ini adalah karena metode tersebut berbasis pada pengalaman langsung, sehingga peneliti dapat melihat, mengamati, sekaligus mendokumentasikan perilaku maupun peristiwa secara nyata. Selain itu, observasi memungkinkan peneliti menangkap kejadian dalam konteks yang autentik, memberikan informasi langsung dari data lapangan, serta membantu mengurangi potensi bias yang kerap muncul dalam wawancara. Lebih jauh, pendekatan ini juga memudahkan peneliti dalam memahami dinamika dan situasi kompleks di lapangan (Moleong, 2012:174).

3.6.2 Wawancara

Peneliti memperoleh data dengan langsung berada di lokasi penelitian dan berpartisipasi aktif melalui interaksi langsung dengan individu yang terkait dengan objek studi. Penelitian ini menerapkan wawancara semi-terstruktur, yang memberikan fleksibilitas lebih dibandingkan wawancara yang sepenuhnya terstruktur. Menurut Sugiyono (2008:72), wawancara semi-terstruktur merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi masalah secara terbuka, di mana responden diminta menjelaskan pandangan atau pengalaman mereka. Metode ini membantu peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interpretasi partisipan terhadap fenomena yang diamati. Selain itu, wawancara yang digunakan termasuk wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data melalui pertanyaan dan interaksi tatap muka antara pewawancara dan informan, baik dengan pedoman wawancara maupun tanpa pedoman, di mana hubungan sosial antara

keduanya berlangsung dalam jangka waktu yang relatif lama (Sugiyono, 2013:231).

3.6.3 Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber tertulis seperti arsip, buku yang memuat teori, pendapat, maupun peraturan yang relevan dan memberikan informasi penting bagi penelitian (Fiantika dkk., 2022). Metode ini mencakup langkah – langkah sistematis dalam menghimpun, menelaah, dan mencatat berbagai dokumen resmi, arsip, catatan, rekaman, foto, surat-menyurat, laporan, serta berbagai bahan tercetak atau terekam lain yang berkaitan dengan topik penelitian (Pakpahan, 2021).

3.7. TEKNIK ANALISIS DATA

Menurut Noeng Muhamad (1998:104), analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara teratur catatan hasil observasi, wawancara, dan data lainnya agar peneliti dapat lebih memahami kasus yang sedang diteliti, serta menyajikan hasil temuan tersebut kepada orang lain. Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam, analisis juga perlu dilanjutkan dengan pencarian makna yang terus-menerus. Dari pengertian ini, terdapat beberapa poin penting, yaitu: (a) pencarian data melibatkan proses kerja lapangan yang didahului oleh persiapan awal, (b) penyusunan hasil temuan secara sistematis, (c) penyampaian hasil temuan kepada pihak lain, dan (d) pencarian makna secara berkelanjutan hingga tidak ditemukan lagi makna lain yang relevan, yang menunjukkan pentingnya pendalaman pemahaman peneliti terhadap peristiwa atau kasus yang dikaji. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Bogdan, yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan berbagai bahan lain secara sistematis, guna meningkatkan pemahaman peneliti serta menyampaikan hasil temuannya kepada orang lain (Sugiyono, 2007:427). Yang perlu mendapat perhatian dari pandangan Bogdan, selain poin yang disampaikan oleh Noeng Muhamad, adalah

pentingnya keberadaan catatan lapangan (*field notes*), yang akan dibahas lebih lanjut dalam penjelasan berikutnya.

Terdapat tiga tahapan utama dalam analisis data kualitatif, yaitu :

3.7.1 Reduksi data

Proses reduksi data melibatkan pemilihan informasi, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tahapan ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul, sesuai dengan kerangka konseptual penelitian, rumusan masalah, dan metode pengumpulan data yang digunakan peneliti. Reduksi data mencakup beberapa kegiatan, yaitu: (1) merangkum data, (2) memberi kode pada data, (3) menelusuri tema-tema yang muncul, dan (4) membentuk gugus-gugus data.

3.7.2 Penyajian data

Kegiatan ini terjadi ketika sekumpulan informasi diorganisasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Penyajian ini menyatukan informasi secara terstruktur dan mudah diakses, sehingga mempermudah peneliti untuk memahami situasi yang sedang diamati, mengevaluasi ketepatan kesimpulan, atau melakukan analisis ulang bila diperlukan.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai menafsirkan makna objek, mencatat pola-pola yang muncul (dalam catatan teori), penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, serta proposisi yang relevan. Kesimpulan awal ditangani dengan cara yang longgar, tetap terbuka, dan bersifat skeptis, namun tetap ada arahan awal. Seiring berjalannya penelitian, kesimpulan ini berkembang menjadi

lebih rinci dan memiliki dasar yang lebih kuat. Proses verifikasi kesimpulan dilakukan selama penelitian melalui beberapa cara, yaitu: (1) refleksi ulang saat menulis, (2) meninjau kembali catatan lapangan, (3) diskusi dan pertukaran pendapat dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan intersubjektif, dan (4) menempatkan temuan tertentu dalam konteks data lain untuk memastikan konsistensi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Bab ini menyajikan data yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi literatur yang terkait. Penelitian di lakukan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan tujuan untuk menganalisis persepsi stakeholder terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan yang mencakup cagar alam, taman wisata, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas. Secara geografis, TNBTS berada di antara $7^{\circ}54' - 8^{\circ}13'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}51' - 113^{\circ}04'$ Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997, luas TNBTS adalah 50.276,3 hektar, terdiri dari daratan seluas 50.266,05 hektar dan perairan (danau) seluas 10,25 hektar. Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 68/Kpts/DJ-VI/98 tanggal 4 Mei 1998, kawasan TNBTS dibagi menjadi lima zonasi, yaitu zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan intensif, zona pemanfaatan tradisional, dan zona rehabilitasi. Pengelolaan TNBTS dilakukan oleh Balai Besar TNBTS yang terbagi menjadi dua bidang pengelolaan: Bidang Pengelolaan TN Wilayah I di Wonorejo-Pasuruan dan Bidang Pengelolaan TN Wilayah II di Purworejo-Lumajang. Setiap bidang pengelolaan membawahi dua Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN), dan setiap SPTN mengelola beberapa resort dengan sistem *Resort Base Management (RBM)*.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan bagian dari rangkaian pegunungan berapi yang membentang di Pulau Jawa. Gunung Semeru, dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa dan termasuk dalam rangkaian pegunungan ini. Berdasarkan database Taman Nasional Indonesia (Widiyanti, 2001), sebelum ditetapkan sebagai Taman Nasional, wilayah Bromo, Tengger, dan Semeru

sudah lebih dahulu memiliki status konservasi. Pada tahun 1919, Laut Pasir Tengger ditetapkan sebagai Cagar Alam seluas 5.287,33 ha, diikuti Ranu Kumbolo pada tahun 1921 seluas 1.340 ha, serta beberapa taman wisata pada tahun 1981, yaitu Laut Pasir Tengger (2,67 ha), Ranu Pani dan Ranu Regulo (96 ha), dan Ranu Darungan (380 ha) (Widiyanti, 2001).

Penetapan kawasan ini sebagai Taman Nasional dilakukan melalui SK Menteri Kehutanan No. 736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 dengan luas 58.000 ha, yang kemudian diperbarui melalui SK Menhut No. 278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 dengan luas 50.276,20 ha. Secara administratif, TNBTS berada di empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu Probolinggo, Malang, Pasuruan, dan Lumajang.

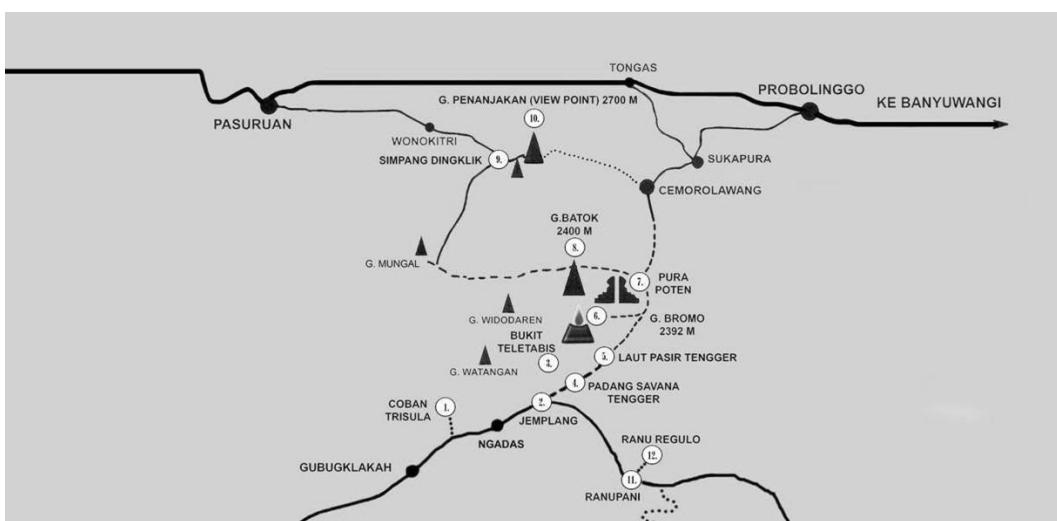
Alasan ditetapkannya kawasan Bromo Tengger Semeru sebagai Taman Nasional antara lain:

1. Adanya potensi sumber daya alam yang menonjol, meliputi; Flora langka dan endemik yang menarik, Ekosistem khas, Gunung berapi aktif, Habitat satwa migran. Fenomena alam unik dan menakjubkan, seperti kaldera di dalam kaldera serta danau luas di pegunungan, hamparan lautan pasir.
2. Potensi hidrologis sebagai daerah tangkapan air untuk DAS Brantas dan DAS Sampeyan Madura
3. Keberadaan budaya dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger

Secara administratif, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berada di empat kabupaten di Jawa Timur, yaitu Malang, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Di dalam maupun sekitar kawasan TNBTS, masyarakat Tengger dikenal sebagai komunitas yang dominan. Desa-desa yang dihuni oleh masyarakat Tengger tersebar di keempat kabupaten tersebut, terdiri dari 17 desa dengan mayoritas penduduk beragama Hindu dan tetap menjaga adat-istiadat Tengger. Desa-desa tersebut antara lain Ngadas, Jetak, Wonotoro, Ngadirejo, dan Ngadisari di Kecamatan Sukapura, Probolinggo; Ledokombo, Pandansari, dan Wonokerso di Kecamatan Sumber, Probolinggo; Tosari, Wonokitri, Sedaeng, Ngadiwono, dan Podokoyo di Kecamatan Tosari, Pasuruan; Keduwung di Kecamatan Puspo, Pasuruan; Ngadas di Kecamatan

Poncokusumo, Malang; serta Argosari dan Ranu Pani di Kecamatan Senduro, Lumajang (Sutarto, 2006).

Selain berfungsi sebagai cagar alam, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas, TNBTS juga menyimpan berbagai potensi objek wisata. Objek wisata tersebut dikelompokkan menjadi enam jenis, termasuk wisata alam seperti Gunung Pananjakan, Gunung Bromo, Bukit Teletabis, dan Coban Trisula, serta wisata budaya seperti Gunung Batok dan Pura Poten (Gambar 4.1).



Gambar 4.1
Peta Kawasan Wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2025.

Akses menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dapat ditempuh dari empat wilayah utama, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Masing-masing jalur memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri, serta memberikan pengalaman perjalanan yang unik bagi para wisatawan. Dari arah Probolinggo, pengunjung dapat mengakses Bromo melalui jalur yang paling populer dan sering digunakan, yaitu melalui desa Cemoro Lawang. Rute ini dikenal paling mudah dijangkau karena infrastruktur jalan yang relatif baik dan tersedia banyak pilihan akomodasi serta transportasi umum, seperti angkot dan ojek. Dari

pusat kota Probolinggo, perjalanan dilanjutkan menuju Sukapura dan kemudian ke Cemoro Lawang yang merupakan gerbang utama menuju kawasan kawah Bromo. Jalur ini juga cocok untuk wisatawan yang ingin menikmati panorama matahari terbit dari Penanjakan, salah satu spot terbaik untuk menyaksikan sunrise di kawasan ini. Penarikan tiket masuk kembali di jalur Probolinggo menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pengelola untuk memastikan setiap pengunjung yang memasuki kawasan konservasi tersebut telah membayar retribusi resmi. Meskipun pengunjung biasanya sudah membeli tiket secara online melalui situs resmi TNBTS sebelum tiba di lokasi, di jalur Probolinggo, tepatnya di kawasan Cemoro Lawang, petugas masih melakukan pengecekan ulang dan penarikan tiket sebagai bentuk verifikasi.

Proses ini dilakukan guna menghindari adanya wisatawan yang masuk tanpa tiket resmi, yang sering terjadi karena akses jalur Probolinggo yang terbuka dan cukup padat saat musim liburan. Dalam praktiknya, pengunjung diminta menunjukkan bukti pembelian tiket secara digital atau cetak, dan apabila belum memiliki, mereka akan diarahkan untuk membeli tiket di tempat melalui sistem *online*. Penarikan ulang ini kerap menimbulkan kebingungan bagi sebagian wisatawan, terutama yang merasa telah membayar tiket sebelumnya, namun kebijakan ini menjadi langkah penting untuk menjaga keteraturan, pengelolaan kapasitas pengunjung, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan di kawasan TNBTS. Selain itu, kehadiran petugas di pintu masuk juga berfungsi untuk memberikan informasi, menjaga keamanan, dan memastikan bahwa seluruh aktivitas wisata di area Bromo tetap berjalan sesuai dengan aturan konservasi yang berlaku.

Akses dari Pasuruan, pengunjung bisa masuk melalui desa Tosari. Jalur ini tidak seramai Probolinggo namun menawarkan suasana yang lebih tenang dan alami. Desa Tosari adalah pintu masuk ke Gunung Penanjakan dan menjadi jalur favorit bagi mereka yang ingin menikmati keindahan Bromo dari sisi yang lebih eksklusif. Akses jalan dari Pasuruan ke Tosari cukup menantang karena kondisi jalan yang menanjak dan berkelok, namun pemandangan pegunungan dan perkebunan sepanjang perjalanan menjadi daya tarik tersendiri. Fasilitas seperti

penginapan dan jasa sewa jeep juga tersedia, meskipun tidak sebanyak di Cemoro Lawang.

Akses dari Malang memberikan pengalaman yang berbeda, karena pengunjung akan melewati kawasan Tumpang dan Gubugklakah sebelum sampai di Jemplang, yang merupakan titik temu menuju lautan pasir Bromo. Jalur ini menawarkan perjalanan yang lebih panjang dan medan yang lebih menantang, namun sangat disukai oleh wisatawan yang ingin menikmati nuansa alam pegunungan secara lebih menyeluruh. Selain itu, dari jalur ini juga dapat dilanjutkan ke Ranu Pane, yang merupakan titik awal pendakian ke Gunung Semeru. Sepanjang jalur Malang–Tumpang, wisatawan akan disuguhki pemandangan hutan, sungai, dan ladang pertanian yang asri.



Gambar 4.2 Pintu masuk dari arah Malang

Sumber : Dokumentasi Pribadi,2025.

Jalur dari Lumajang adalah yang paling jarang digunakan untuk langsung menuju Bromo, namun menjadi jalur utama bagi pendaki Gunung Semeru yang memulai pendakian dari Ranu Pane. Meski demikian, rute ini menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa, termasuk danau-danau vulkanik seperti Ranu Kumbolo dan Ranu Regulo. Wisatawan yang melalui jalur Lumajang biasanya bertujuan untuk melakukan aktivitas pendakian atau menikmati ketenangan kawasan danau yang jauh dari keramaian. Akses jalan menuju Ranu Pane cukup

menantang dengan medan berbatu dan tanjakan tajam, sehingga lebih cocok bagi pengunjung yang menyukai petualangan.

Secara keseluruhan, akses menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari keempat wilayah ini masing-masing memiliki daya tarik dan kesulitannya tersendiri. Wisatawan tinggal menyesuaikan pilihan rute dengan jenis pengalaman yang ingin mereka dapatkan — apakah itu kemudahan akses, panorama alam, atau tantangan petualangan. Setiap jalur membawa cerita dan pemandangan yang berbeda, namun semuanya berujung pada satu tujuan: menikmati keajaiban alam Gunung Bromo dan sekitarnya yang memukau.

4.1.2 Daya tarik dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)

A. Gunung Bromo

Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata utama di Provinsi Jawa Timur. Nama “Bromo” berasal dari bahasa Sansekerta “Brahma”, yang merupakan salah satu Dewa Utama dalam agama Hindu. Gunung ini terletak di empat kabupaten dalam kawasan TNBTS dan memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut. Gunung Bromo dikelilingi oleh beberapa gunung lain, seperti Gunung Batok (2.470 mdpl), Gunung Kursi (2.581 mdpl), Gunung Widodaren (2.650 mdpl), dan Gunung Penanjakan (2.770 mdpl).

Untuk mencapai Gunung Bromo, pengunjung harus melewati lautan pasir seluas sekitar 10 km² dari Pegunungan Tengger. Banyak wisatawan yang memilih menjelajahi lautan pasir ini menggunakan motor trail untuk menambah keseruan petualangan, namun pengelola TNBTS juga menyediakan opsi sewa mobil jeep atau kuda untuk memudahkan perjalanan. Jeep biasanya disewa per rombongan, dengan kapasitas 6 orang untuk mobil tertutup dan 10 orang untuk mobil bak terbuka. Selain itu, pengunjung dapat menikmati pemandangan Gunung Bromo dari Pegunungan Tengger, dengan waktu terbaik untuk melihat panorama adalah saat matahari terbit (*sunrise*) dan matahari terbenam (*sunset*).

Keindahan alam juga bukan menjadi satu daya tarik, wisatawan juga berkesempatan menyaksikan Upacara Kasodo yang digelar masyarakat Suku Tengger setiap akhir Juni di kompleks Gunung Bromo. Upacara ini melibatkan

pelarungan hasil panen atau hewan ternak dari tempat peribadatan (Poten) menuju kawah Bromo, sebagai bentuk rasa syukur atas kelancaran panen dan permohonan agar terhindar dari malapetaka, yang menjadi ritual tahunan penting bagi masyarakat setempat.



Gambar 4.3 Gunung Bromo

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2025

Gunung Bromo yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditetapkan sebagai salah satu taman nasional kelas I di Indonesia karena memiliki karakteristik ekologis, budaya, serta nilai strategis pariwisata yang sangat tinggi. Dari sisi ekologi, kawasan ini mencakup ekosistem pegunungan dengan keanekaragaman hayati yang khas, mulai dari padang rumput, hutan pegunungan, hingga hutan sub-alpin yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sumber daya air. Keunikan lansekap berupa kaldera Tengger, lautan pasir, dan kehadiran Gunung Bromo yang masih aktif menjadikannya laboratorium alam yang bernilai tinggi baik untuk penelitian ilmiah maupun konservasi. Dari sisi budaya, kawasan ini juga menjadi pusat kehidupan masyarakat Tengger yang memiliki tradisi kuat, seperti upacara Yadnya Kasada, yang memperlihatkan keterkaitan harmonis antara manusia dan alam. Nilai budaya tersebut menambah daya tarik kawasan ini sebagai destinasi pariwisata yang menggabungkan aspek ekologi dengan kearifan lokal.

Penetapan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) secara hukum merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam dengan ekosistem asli, dikelola melalui sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, serta rekreasi alam. Pengelolaan TNBTS juga didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang memberikan pedoman teknis mengenai tata kelola, zonasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan. Lebih lanjut, pengaturan kelembagaan TNBTS berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menempatkan Balai Besar TNBTS sebagai unit teknis yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Sisi dari kebijakan strategis, penetapan Bromo sebagai taman nasional kelas I sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 dan 2020–2024, yang menekankan pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia. TNBTS termasuk dalam program 10 Destinasi Prioritas Nasional (atau dikenal sebagai 10 Bali Baru), sehingga kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai objek konservasi, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi lokal dan nasional. Klasifikasi kelas I menandakan bahwa kawasan ini memiliki urgensi pengelolaan yang tinggi, mengingat tingginya tekanan wisatawan, kerentanan lanskap vulkanik, serta nilai ekonomi dan budaya yang strategis.

Landasan hukum yang kuat dan dukungan kebijakan konservasi serta pariwisata nasional, penetapan TNBTS sebagai taman nasional kelas I dapat dipahami sebagai langkah untuk menyeimbangkan tiga pilar utama, yakni konservasi ekosistem, pelestarian budaya lokal, dan optimalisasi manfaat ekonomi. Hal ini sekaligus menunjukkan peran penting pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang baik bagi masyarakat lokal maupun bangsa secara keseluruhan.

Perspektif ekonomi dan pariwisata, TNBTS menempati posisi strategis karena mampu menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya, baik domestik maupun

mancanegara. Posisinya yang termasuk dalam *10 Bali Baru* atau destinasi prioritas nasional mempertegas perannya sebagai motor penggerak pariwisata nasional. Penerimaan dari sektor pariwisata di kawasan ini berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan. Penetapan TNBTS sebagai taman nasional kelas I juga didasarkan pada urgensi pengelolaan yang lebih intensif, karena tingginya tekanan wisatawan terhadap ekosistem serta potensi kerentanan bencana alam akibat aktivitas vulkanik. Dengan demikian, klasifikasi ini menuntut penerapan tata kelola berbasis konservasi yang ketat, penguatan regulasi, serta peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan wisata agar keberlanjutan fungsi ekologi, budaya, dan ekonomi dapat terjaga dalam jangka panjang.

B. Gunung Semeru

Gunung Semeru dijuluki sebagai “Atap Jawa” karena merupakan titik tertinggi di Pulau Jawa. Dengan ketinggian mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl), Semeru menempati posisi gunung tertinggi keempat di Indonesia, setelah Puncak Cartenz Pyramid di Pegunungan Jayawijaya, Gunung Kerinci, dan Gunung Rinjani. Terbentuknya gunung ini disebabkan tumbukan lempeng Eurasia dan Indo- Australia. Kawasan Semeru terdiri atas hutan, danau, dan padang sabana. Hutan montane, hutan diepterokarp bukit, serta hutan gunung menyimpan flora dan fauna yang pelestariannya dikelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama Komunitas Sahabat Volunteer Semeru (Saver). Dalam trek pendakian, sering pula para pendaki menjumpai kijang, kancil, belibis liar, hingga macan kumbang yang hidup di sekitar mata air maupun danau. Bagi para pendaki, tempat favorit mendirikan tenda salahsatunya di tepian danau Ranu Kumbolo.

Danau vulkanik dengan ketinggian 2.400 mdpl ini memudahkan pendaki yang ingin mengambil air, membuat api unggul, menikmati momen sunrise ataupun sunset bersama dengan panoramanya yang indah diapit dua bukit di seberangnya. Selain Ranu Kumbolo, adapula Ranu Pani dan Ranu Regulo yang terletak dekat basecamp tempat registrasi pendakian Semeru serta Ranu Darungan

di selatan gunung. Setelah menginap di area Ranu Kumbolo, para pendaki selanjutnya melewati bukit “tanjakan cinta” untuk melanjutkan perjalanan ke sabana Semeru. Lahan terbuka luas ini sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai padang lavender, padahal tanaman liar yang tumbuh di sabana ini merupakan jenis verbena. Kebutuhan air sangat tercukupi di Semeru. Selain dari Ranu Kumbolo, terdapat mata air Sumber Mani yang letaknya di sebelah Kalimati, basecamp terakhir pendakian aman Semeru. Puncak Semeru terdiri atas hamparan pasir berkerikil luas yang di sisi nya nampak jelas kawah jonggring saloka yang masih aktif mengeluarkan gas beracun (sulfatara). Pengunjung perlu berhati-hati dan tidak disarankan berada di puncak di atas pukul 10 pagi, karena angin akan berubah arah dan membawa gas beracun ke jalur pendakian.

Danau vulkanik yang berada pada ketinggian 2.400 mdpl ini menjadi tempat yang praktis bagi pendaki untuk mengambil air, membuat api unggun, serta menikmati matahari terbit dan terbenam dengan panorama indah yang dikelilingi dua bukit. Selain Ranu Kumbolo, terdapat juga Ranu Pani dan Ranu Regulo yang berlokasi dekat basecamp pendaftaran pendakian Semeru, serta Ranu Darungan di bagian selatan gunung. Setelah bermalam di Ranu Kumbolo, pendaki melanjutkan perjalanan menuju sabana Semeru melalui bukit yang dikenal sebagai “Tanjakan Cinta”. Lahan terbuka yang luas ini sering keliru disebut sebagai padang lavender, padahal tanaman liar yang tumbuh di sana sebenarnya adalah jenis verbena.

Kebutuhan air para pendaki di Semeru relatif terpenuhi, selain dari Ranu Kumbolo, juga tersedia dari mata air Sumber Mani yang terletak di sebelah Kalimati, basecamp terakhir sebelum mencapai puncak. Puncak Semeru sendiri merupakan hamparan pasir berkerikil yang luas dengan kawah Jonggring Saloka di sisinya, yang masih aktif mengeluarkan gas beracun (sulfatara). Pengunjung disarankan untuk berhati-hati dan tidak berada di puncak setelah pukul 10 pagi, karena perubahan arah angin dapat membawa gas beracun ke jalur pendakian

C. Pegunungan Tengger

Sekitar 40 ribu tahun yang lalu, Pegunungan Tengger merupakan gunung dengan ketinggian sekitar 4.000 mdpl. Letusan besar yang terjadi kemudian menghancurkan puncaknya, membentuk kawah atau kaldera sedalam 500 meter

dengan diameter 9 x 10 km. Suhu di kawasan ini berkisar antara 8–17°C, sementara pada malam hari suhu dapat mencapai -2°C dengan munculnya butiran es tipis. Kondisi iklim yang sejuk serta tanah vulkanik yang subur membuat Pegunungan Tengger cocok untuk budidaya tanaman hortikultura. Sayuran seperti sawi, kubis, wortel, lobak, selada, brokoli, dan kentang menjadi komoditas yang diperdagangkan di pasar domestik hingga menjadi pemasok di tingkat provinsi. Selain itu, penduduk setempat juga menanam edelweiss yang kemudian dijadikan souvenir bagi pengunjung.

Melihat tingginya jumlah wisatawan yang datang, muncul inisiatif untuk meningkatkan daya tarik kawasan ini. Pengusaha Java Banana Lodge, Café, & Gallery bersama komunitas lokal bekerja sama dengan Sigit Pramono, Djaduk Ferianto, dan Butet Kartaredjasa untuk menyelenggarakan pentas seni di lereng Pegunungan Tengger, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini melahirkan “Jazz Gunung Bromo” yang pertama kali diadakan pada tahun 2009 di amfiteater terbuka resor tersebut. Sejak itu, festival musik jazz kontemporer ini terus berlangsung setiap tahun, menampilkan musisi ternama seperti Glenn Fredly, Tompi, Tulus, Maliq & D’Essentials, Indra Lesmana, dan Dewa Budjana. Selain musisi lokal, musisi internasional seperti Ernesto Castelo (Kuba), Ian Scionti Trio (Spanyol), dan Ian Williams (Inggris) juga pernah tampil. Inisiatif ini bertujuan untuk melakukan re-branding kawasan Pegunungan Tengger sebagai destinasi wisata yang menarik untuk liburan panjang.

D. Air Terjun Madakaripura

Air Terjun Madakaripura, yang terletak di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, merupakan air terjun alami setinggi 200 meter dan menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Air terjun ini berada di lereng Gunung Bromo, tepatnya di lembah sempit berbentuk setengah lingkaran yang membentuk ceruk, di mana air dari anak Sungai Lawean mengalir dan jatuh ke sebuah cekungan menyerupai danau kecil. Akses menuju Madakaripura cukup mudah, pengunjung dapat menuju dari Kabupaten Probolinggo melalui Kecamatan Tongas, dengan papan penunjuk arah sepanjang jalan menuju kompleks air terjun.

Fasilitas wisata yang tersedia meliputi area parkir yang luas, spot foto untuk pengunjung, toilet yang memadai, serta gerai makanan di dekat loket masuk. Untuk mencapai air terjun utama, pengunjung harus menempuh trek sepanjang sekitar 1,5 kilometer yang mengelilingi lereng bukit, sehingga cukup menantang secara fisik. Namun, semua usaha itu terbayar dengan panorama menakjubkan dari Air Terjun Madakaripura.

4.1.3 Dasar Kebijakan Kenaikan Tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai efektif berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024. Sejak berlakunya PP ini, beberapa peraturan sebelumnya dicabut dan tidak lagi berlaku, yaitu:

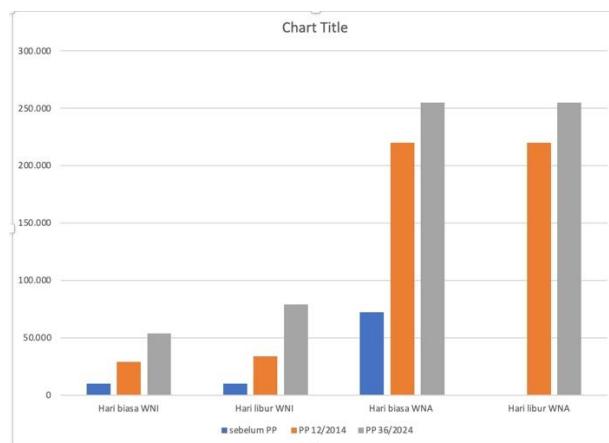
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang berlaku di Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540).

Dengan diberlakukannya PP ini, ketiga peraturan tersebut resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4.1.4 Implementasi kebijakan PP Nomor 36 Tahun 2024 pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Sejak 30 Oktober 2024, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menerapkan penyesuaian tarif masuk kawasan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2024 sebagai pengganti regulasi lama dari tahun 2014. Kebijakan ini di implementasikan melalui surat pengumuman nomor PG.08/T8/TU/KSA.5.1/B/10/2024, yang secara tegas menetapkan tarif baru bagi pengunjung domestik dan mancanegara, serta untuk akses kendaraan dan aktivitas khusus seperti kunjungan, kemah, penggunaan drone, dan foto *pre-wedding*. Implementasi ini juga diiringi dengan perubahan prosedur teknis yang mencakup sistem pemesan tiket masuk secara daring (*online booking*) melalui situs resmi bookingbromo.bromotenggersemeru.org, sebagai upaya untuk menyederhanakan verifikasi, menyeragamkan alur pembayaran, dan menghindari antrean fisik yang panjang di pintu masuk kawasan.

Secara lebih detail, tarif baru ini terdiri atas beberapa komponen utama. Untuk wisatawan nusantara, biaya masuk mencapai Rp 54.000 per orang pada hari kerja dan naik menjadi Rp 79.000 pada hari libur; sementara wisatawan mancanegara dikenakan tarif tetap Rp 255.000 per orang, termasuk premi asuransi sebesar Rp 4.000 untuk domestik dan Rp 5.000 untuk mancanegara. Tarif kendaraan darat yang memasuki kawasan ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk sepeda motor, Rp 10.000 untuk mobil, Rp 2.000 untuk sepeda, dan Rp 1.500 untuk kuda. Selain itu, kawasan Ranu Regulo juga memiliki sistem tarif tersendiri sesuai jenis kegiatan: kunjungan biasa dan berkemah, baik untuk satu hari maupun dua hari, dengan tarif mulai dari sekitar Rp 24.000 hingga Rp 415.000, tergantung status pengunjung (domestik atau mancanegara), lama dan jenis kegiatan, serta termasuk asuransi.

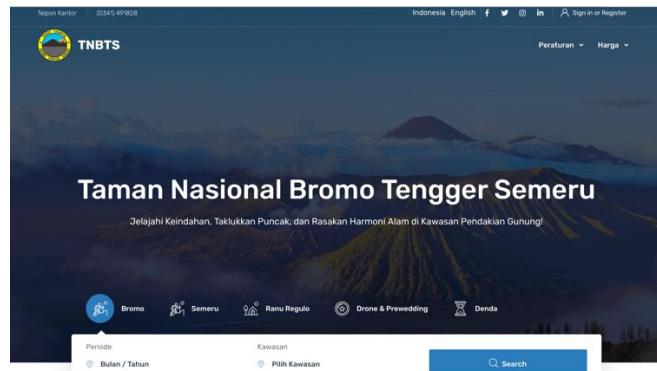


Gambar 4.4 Grafik Kenaikan harga tiket di TNBTS

Sumber : Dokumentasi pribadi,2025

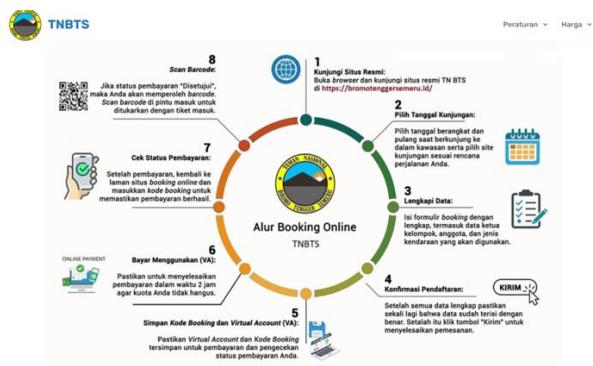
Seiring dengan peluncuran tarif baru, pihak pengelola juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, pengunjung, serta pelaku jasa wisata. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Balai TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan bahwa tarif baru mencakup aspek-aspek yang dulunya belum diatur seperti penggunaan drone sebesar Rp 2 juta per unit per hari dan foto pre-wedding: Rp 1 juta untuk domestik, Rp 3 juta bagi wisatawan asing. Aturan ini muncul sebagai respons terhadap fenomena baru yang tidak relevan pada masa 2012, saat drone dan pre-wedding belum populer.

Sosialisasi juga menekankan bahwa pemesanan daring akan membantu pengendalian kuota pengunjung dan meningkatkan tata kelola kawasan serta menjadi bagian dari kebijakan nasional yang berlaku di seluruh taman nasional dan wisata alam se-Indonesia. Selain itu, kebijakan drone yang dikenai tarif tinggi pun menuai perhatian. Kebijakan ini dilatarbelakangi kebutuhan regulasi yang disesuaikan dengan teknologi mutakhir, meskipun sebelumnya sudah ada SOP pelarangan drone dalam jalur pendakian Semeru sejak 2019. Hal tersebut dipertegas oleh Kementerian KSDAE bahwa penerapan tarif drone dan peraturan terkait tidak ada kaitannya dengan penemuan ladang ganja di kawasan TNBTS.



Gambar 4.5 Web *booking* tiket TNBTS

Sumber : <https://bromotenggersemeru.id>



Gambar 4.6 Alur Pendaftaran *booking* tiket TNBTS

Sumber : <https://bromotenggersemeru.id>

Secara keseluruhan, implementasi PP Nomor 36 Tahun 2024 di TNBTS ditandai dengan penyesuaian tarif menyeluruh, transformasi sistem pemesanan, penetapan tarif atas layanan modern, serta upaya pemantauan kuota dan penyusunan tata kelola yang lebih tertib. Meskipun terdapat tantangan ekonomi bagi pelaku lokal, kebijakan ini dirancang untuk menjaga konservasi kawasan, meningkatkan pemasukan negara, dan menyediakan fondasi pelayanan wisata yang lebih berkelanjutan.

Hasil wawancara dalam penelitian ini disusun berdasarkan data yang diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan utama dalam proses pengumpulan informasi dari narasumber di lapangan. Dengan menggunakan

pendekatan ini, analisis yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan Gambaran yang lebih sistematis dan terarah terkait objek penelitian, sesuai dengan fokus permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun penjabaran hasil wawancara pada bagian berikut.

4.2.1 Kenaikan Harga tiket masuk di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Penentuan harga merupakan keputusan penting yang memengaruhi keberhasilan operasional suatu perusahaan. Harga menjadi satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Penetapan harga pada produk atau jasa yang ditawarkan akan berdampak langsung pada kepuasan pelanggan; apabila konsumen menilai harga yang diberikan sesuai dengan kualitas produk atau jasa yang diterima, maka akan tercipta tingkat kepuasan tertentu. Perusahaan perlu memahami bahwa konsumen menginginkan harga yang wajar, di mana biaya yang mereka keluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa tersebut, Tjiptono (2014:192).

Pemasaran jasa dalam harga memiliki peran sangat penting karena menjadi sumber pendapatan utama bagi bisnis. Keputusan penetapan harga menjadi krusial terutama karena sifat jasa yang tidak berwujud (Payne, 2000:171-172). Sementara itu, Kotler dan Armstrong (2008:345) menyatakan bahwa harga adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk suatu produk atau jasa, atau nilai yang ditukar konsumen untuk memperoleh manfaat dari penggunaan atau kepemilikan produk atau jasa tersebut.

PP No. 12/2014 sendiri mengatur jenis dan tarif PNBP pada Kementerian Kehutanan dengan lampiran tarif yang pada saat itu menjadi acuan. Dengan berjalannya waktu dan munculnya kebutuhan baru, Pemerintah menerbitkan PP No. 36/2024 yang menggantikan pengaturan sebelumnya dan menata ulang jenis serta tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam praktiknya ini diikuti oleh kenaikan tarif yang diberlakukan Balai TNBTS sejak akhir Oktober 2024, di mana contoh penerapan menunjukkan kenaikan bertahap: tarif kunjungan untuk wisatawan lokal dinaikkan.

Alasan kenaikan yang tercantum dalam dokumen resmi PP No. 36/2024 disusun untuk menyesuaikan jenis dan tarif PNBP seiring perubahan struktur

organisasi (penggabungan/penataan ulang kewenangan KLHK) dan untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari PNBP sebagai sumber pembiayaan. Kedua, kenaikan tarif dipandang perlu untuk menutup biaya pengelolaan konservasi termasuk pengawasan, pemeliharaan infrastruktur jalur dan fasilitas wisata, pengendalian kerusakan lingkungan akibat kunjungan massal, serta pembiayaan program konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di sekitar kawasan sehingga tarif bukan hanya sebagai sumber penerimaan tetapi juga instrumen pengelolaan pengunjung (*visitor management*).

Penyesuaian tarif dilakukan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 mengenai jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya yang berasal dari pemanfaatan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Penyesuaian ini juga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diperlukan pengaturan kembali mengenai jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.

Kenaikan tarif mulai diberlakukan pada tanggal 30 Oktober 2024, berdasarkan peraturan pemerintah nomer 36 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyatakan bahwa kenaikan ini disebabkan oleh fakta bahwa tarif tiket tidak mengalami perubahan selama kurang lebih 10 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan PNBP dan mendukung Pembangunan nasional serta kelestarian kawasan TNBTS. Tarif tiket di TNBTS sebelumnya yaitu 29.000 pada *weekday* naik menjadi 54.000 dan 34.000 pada *weekend* naik menjadi 79.000.

1. Persepsi Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terhadap kenaikan tiket di TNBTS

Persepsi pengelola di Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terhadap kenaikan harga tiket masuk kawasan wisata alam tersebut cenderung beragam, namun secara umum dapat digambarkan sebagai hasil pertimbangan yang kompleks antara kebutuhan pelestarian lingkungan, peningkatan pelayanan, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat dan pengunjung. Dari sudut pandang pengelola, kenaikan tarif ini bukan semata-mata upaya komersialisasi kawasan konservasi, melainkan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan kawasan, terutama dalam menjaga ekosistem dan mengontrol jumlah kunjungan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Kutipan wawancara :

“Kenaikan harga tiket di Taman Nasional baru terjadi setelah 10 tahun, kami selaku pengelola di balai besar hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat.” (N6)

Kenaikan harga tiket juga dimaksudkan agar terdapat redistribusi beban biaya, di mana pengunjung turut berkontribusi lebih besar terhadap upaya pelestarian kawasan. Namun demikian, para pengelola juga menyadari adanya resistensi dari masyarakat lokal dan pelaku usaha pariwisata di sekitar kawasan, terutama yang khawatir terhadap dampak penurunan jumlah wisatawan akibat kenaikan harga tersebut.. Di sisi lain, pengelola juga melihat kenaikan tiket sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata, seperti pengelolaan sampah yang lebih sistematis, peningkatan keamanan jalur pendakian, serta penyediaan informasi yang lebih edukatif mengenai konservasi alam.

Kutipan wawancara :

“Kebijakan kenaikan tiket sebelumnya sudah jadi wacana pemerintah lalu di sahkan pada tanggal 30 oktober 2024, jadi kami selaku pihak pengelola di balai besar tidak ada pembicaraan terlebih dahulu kepada pihak biro wisata, dan pelaku usaha di sekitar TNBTS.” (N6)

Dengan demikian, persepsi pengelola terhadap kenaikan tiket pada dasarnya dilandasi oleh niat menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, meskipun dalam praktiknya tetap membutuhkan penyesuaian, evaluasi, dan

keterlibatan aktif berbagai pihak agar tujuan tersebut tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) melakukan serangkaian persiapan menyeluruh menjelang diberlakukannya kenaikan harga tiket masuk yang telah disahkan oleh pemerintah. Persiapan ini mencakup berbagai aspek, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan, hingga strategi komunikasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pelatihan intensif diberikan kepada petugas lapangan dan staf pelayanan, guna memastikan mereka mampu memberikan pelayanan prima yang sebanding dengan tarif baru yang ditetapkan. Dalam hal komunikasi, Balai Besar TNBTS menggencarkan sosialisasi melalui berbagai kanal, seperti media sosial dan laman resmi menjelaskan alasan kenaikan tiket, yang salah satunya bertujuan untuk konservasi jangka panjang serta peningkatan kualitas layanan.

Kutipan wawancara :

“kami selaku pengelola selalu melakukan update khusus nya pada sosial media terkait kenaikan tiket dan juga pemberlakuan tentang wajib beli tiket *online* di web TNBTS.” (N6)



Gambar 4.7 Sosialisasi tiket TNBTS dengan beberapa *stakeholder*

Sumber : Instagram bbtnbromotenggersemeru, 2025.

Pengelola juga membuka ruang dialog dengan masyarakat sekitar kawasan taman nasional, termasuk komunitas lokal dan pelaku ekonomi kreatif, guna memastikan bahwa kebijakan baru ini juga memperhatikan kepentingan mereka. Secara keseluruhan, persiapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen pengelola TNBTS dalam menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus menciptakan pengalaman berwisata yang lebih aman, nyaman, dan edukatif bagi para pengunjung.

Upaya pengelolaan wisata berbasis konservasi dan pengendalian dampak *mass tourism*, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh pengunjung untuk membeli tiket secara *online* melalui *platform* resmi. Kebijakan ini bukan sekadar transformasi digital dalam sistem reservasi, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membatasi jumlah kunjungan harian ke kawasan taman nasional yang rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat lonjakan wisatawan. Dengan sistem pembelian tiket daring, pengelola dapat mengatur kuota pengunjung secara *real-time*, menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung kawasan, terutama di titik-titik padat seperti Lautan Pasir, Kawah Bromo, dan jalur pendakian Gunung Semeru.



Gambar 4.8 Wajib tiket *online* pada TNBTS

Sumber : Instagram bbtnbromotenggersemeru, 2025.

Penerapan sistem kuota di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dilaksanakan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, mengingat jumlah pengunjung yang berlebihan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Dengan adanya pembatasan jumlah wisatawan, keberlangsungan flora dan fauna di kawasan konservasi dapat lebih terjamin. Selain itu, pengelolaan kunjungan juga didukung oleh fasilitas pemesanan tiket secara daring yang dipadukan dengan sistem kuota berbasis kajian *Effective Carrying Capacity (ECC)* sebagai dasar penetapan batas kunjungan. Berdasarkan hasil kajian tersebut, ditetapkan kuota maksimal pada beberapa titik destinasi, antara lain: kawasan Bromo-Laut Pasir sebanyak 5.806 orang, Bukit Teletubbies 3.199 orang, View Point Pananjakan (duduk) 641 orang, View Point Pananjakan (berdiri) 892 orang, Bukit Kedaluh 434 orang, Bukit Cinta 141 orang, serta kuota pendakian yang dibatasi 600 orang per hari.

Daya dukung lingkungan yang harus dijuga, penerapan kuota berbasis sistem daring juga memberikan sejumlah manfaat penting. Di antaranya adalah peningkatan kualitas pelayanan bagi pengunjung melalui pelayanan prima, transparansi dalam pengelolaan untuk mengurangi persepsi negatif, kemudahan dalam pengumpulan data, peningkatan aspek keamanan baik bagi wisatawan maupun petugas, serta kelancaran penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke bank mitra. Lebih jauh, sistem ini memudahkan petugas dalam memberikan layanan secara efisien sekaligus mengoptimalkan pengelolaan kawasan TNBTS. Penerapan sistem kuota yang direkomendasikan oleh Inspektorat Jenderal ini pada dasarnya menjadi salah satu strategi konkret dalam mewujudkan praktik ekowisata serta menjadi solusi untuk mengendalikan dampak *mass tourism* di kawasan konservasi tersebut.

Mekanisme yang dilakukan bertujuan untuk mengatur pengunjung yang dikendalikan secara proporsional, sehingga tekanan terhadap lingkungan, flora dan fauna, serta infrastruktur wisata bisa diminimalisir. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan sistem pelaporan data kunjungan yang lebih akurat dan transparan, yang berguna bagi perencanaan konservasi dan pemantauan dampak ekologis jangka panjang. Untuk mendukung implementasinya, Balai Besar TNBTS melakukan

sosialisasi intensif kepada publik dan stakeholder wisata lokal, termasuk operator jeep, pemandu wisata, dan pelaku usaha penginapan, agar mereka memahami prosedur baru ini serta dapat membantu pengunjung dalam proses reservasi daring. Selain itu, sejumlah pos informasi dan bantuan digital juga disiapkan di pintu-pintu masuk kawasan, guna membantu wisatawan yang mengalami kendala teknis. Meskipun menuai beragam respons dari masyarakat dan pelaku usaha wisata, kebijakan ini mencerminkan komitmen kuat pengelola TNBTS dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pariwisata dan pelestarian alam, memastikan bahwa keindahan dan keunikan ekosistem Bromo Tengger Semeru tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Kebijakan wajib tiket online yang di berlakukan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini masih belum sepenuhnya di terapkan oleh para pelaku usaha biro perjalanan wisata. Walaupun pihak pengelola TNBTS sudah sering kali memberikan sosialisasi terhadap wajib tiket online beberapa pihak masih belum saja menerapkannya. Pada Minggu dini hari, 4 Mei 2025, Balai Besar TNBTS telah menyiagakan sistem penjagaan pintu masuk di Cemorolawang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memeriksa jumlah pengunjung, status kewarganegaraan, dan *QR-code* dari tiket *booking online* Awalnya, antara pukul 01.00 hingga 03.00 WIB, kondisi relatif berjalan lancar meskipun ditemukan beberapa pengunjung yang belum melakukan pembelian tiket daring. Namun, sekitar pukul 03.00 WIB, terjadi lonjakan kendaraan dan pengunjung yang masuk sehingga petugas menambah alat pemeriksaan dan melakukan pengecekan langsung ke tiap kendaraan guna mempercepat proses. Pada pukul 06.30 WIB, sebanyak 144 jip tiba di loket, dan dari jumlah tersebut, ternyata 92 jip membawa penumpang yang belum melakukan pemesanan tiket secara *online*. Petugas kemudian meminta agar pengemudi jip yang belum memiliki tiket melakukan pembelian di tempat, yang memicu kemacetan panjang di pintu masuk. Di saat bersamaan, pengunjung dari dalam kawasan juga berusaha keluar melalui jalur yang sama, menambah kepadatan volume kendaraan.



Gambar 4.9 Kronologi kejadian kericuhan di pintu masuk TNBTS jalur Probolinggo

Sumber : Instagram bbtnbromotenggersemeru, 2025.

Situasi memuncak ketika beberapa *tour leader*, pengemudi jip, dan perwakilan agen wisata datang ke petugas, menyampaikan keluhan dengan cara yang tidak pantas termasuk mendorong, mengerumuni, dan melontarkan kata-kata kasar. Petugas kemudian mencoba mengurai kemacetan dengan meminta manajemen PBPSWA Bromo Permai membuka area halaman sebagai jalur alternatif, meskipun mendapat izin dari manajemen, penjaga tidak mengizinkan akses tersebut. Selanjutnya, Kabid Wilayah I TNBTS membuka jalur kuda wisata di belakang Bromo Permai sebagai alternatif pengalihan kendaraan yang menumpuk.

Suasana lalu semakin memanas, para *tour leader* dan pengemudi jip kemudian masuk ke kantor SPTN Wilayah I untuk mencari Kabidwil I. Ketika tidak menemukan yang dicari, mereka melakukan praktek perusakan inventaris kantor: menghancurkan sebuah laptop, mematahkan meja kerja, mencuri kunci dan STNK mobil Pajero Sport milik TNBTS, melubangi ban, menghancurkan barang pecah belah, dan merusak helm petugas. Beberapa tindakan ini tidak terekam kamera

CCTV karena ada oknum yang mematikan listrik dan mencabut kabel CCTV, sehingga indikasi perbuatan ini terencana kuat.



Gambar 4.10 Kericuhan di pintu masuk TNBTS jalur Probolinggo

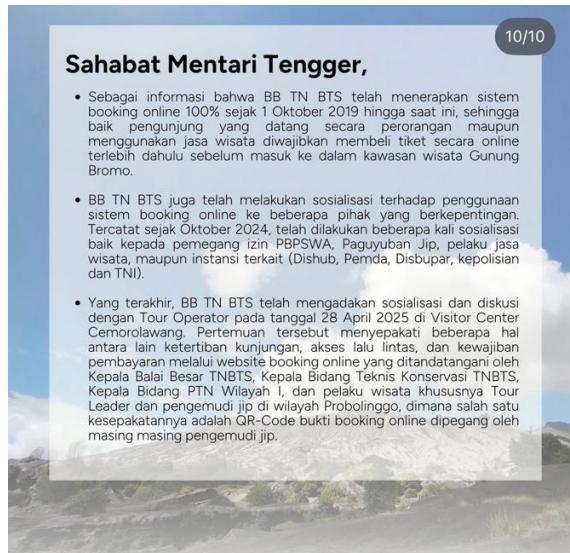
Sumber : Instagram bbtbnbromotenggersemeru, 2025.

Kejadian ini juga mengakibatkan gangguan kenyamanan wisatawan, termasuk kehilangan momen utama saat sunrise karena antrean panjang. Seorang supir jip mengungkapkan bahwa dirinya berangkat sejak pukul 01.00 WIB namun baru bisa melewati antrean pada pukul 05.00 WIB, yang menyebabkan keluhan dari wisatawan. Ia bahkan menyandingkan sistem tiket ini dengan sistem e-tol agar prosesnya dipercepat.

Pihak TNBTS menyatakan akan melaporkan kejadian perusakan aset, pencurian, dan intimidasi terhadap petugas ke pihak berwajib. Namun hingga 7 Mei 2025, laporan resmi ke polisi belum juga diajukan. Meskipun demikian, pihak kepolisian sudah melakukan pengecekan lokasi kejadian dan *mapping* pihak-pihak yang terlibat, sebagai tindak lanjut antisipatif.

Kutipan wawancara :

“setelah terjadi keriuhan pada saat itu, kami selaku pihak pengelola memberikan sosialisasi lalu kami juga menambahkan petugas dan juga alat scan tiket untuk menghindari kemacetan lagi.” (N6)



Gambar 4.11 Pemberlakuan sosialisasi terhadap wajib *booking* tiket *online* di web TNBTS

Sumber : Instagram bbtnbromotenggersemeru, 2025.

2. Persepsi Biro Wisata terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Menurut Grimble dan Wellard dalam Nugroho (2016), pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau perhatian terhadap suatu masalah tertentu. Sedangkan Freeman dalam Nugroho (2016) menjelaskan bahwa pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh tercapainya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan Freeman dalam Kurniawati et al. (2022), pemangku kepentingan dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1) Pemangku kepentingan primer, yang terlibat langsung dengan masalah dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan; 2) Pemangku kepentingan sekunder, yang tidak terlibat langsung dengan masalah dan biasanya tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan.

Pitana dan Gayatri dalam Simanjorang et al. (2020) membagi pemangku kepentingan menjadi pemerintah, pelaku usaha atau swasta, dan masyarakat, karena

masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan penting untuk memastikan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki kewenangan membuat peraturan yang mengikat, agar pemangku kepentingan bertindak sesuai kebijakan yang berlaku. Sementara itu, Rahim dalam Plaituka dan Bay (2021) menyatakan bahwa sektor swasta berperan sebagai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat bertindak sebagai tuan rumah yang menyediakan lingkungan kondusif bagi wisatawan.

Perkembangan pariwisata juga mendorong pertumbuhan industri perjalanan, seperti biro perjalanan wisata. Biro perjalanan ini merupakan usaha yang menyediakan jasa perjalanan dan pariwisata bagi pelanggan, memfasilitasi perjalanan, serta membantu perencanaan dan pengaturan kegiatan wisata. Biro perjalanan wisata berfungsi sebagai penghubung antara keinginan wisatawan dengan pelaksanaan kegiatan pariwisata, termasuk mengkoordinasikan perjalanan wisata. Menurut Pendit dalam Handika dan Purbasari (2018), biro perjalanan wisata adalah perusahaan yang mempersiapkan perjalanan bagi individu yang berencana melakukannya. Selain itu, biro perjalanan memiliki peran penting dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, termasuk memberi edukasi kepada pelanggan tentang praktik perjalanan ramah lingkungan dan dukungan terhadap komunitas lokal.

Kebijakan kenaikan harga tiket masuk di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memunculkan beragam persepsi dari para pemangku kepentingan pariwisata, khususnya biro perjalanan wisata (biro wisata). Biro wisata sebagai pelaku usaha yang secara langsung berinteraksi dengan wisatawan memiliki pandangan yang kompleks terhadap kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, persepsi biro wisata terhadap kenaikan harga tiket masuk TNBTS dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu kekhawatiran ekonomi, ketidakpastian dalam perencanaan, persepsi terhadap transparansi kebijakan, penilaian terhadap justifikasi kenaikan, dan strategi adaptasi jangka panjang.

Kutipan wawancara :

“sebetulnya kami kurang setuju untuk kenaikan tiket, tapi kalau kenaikan tiket ini untuk pelestarian dan pembatasan setuju-setuju saja asal pemerintah juga membenarkan dan menambah beberapa fasilita.” (N4)

Sebagian besar biro wisata menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan tiket masuk akan berdampak langsung terhadap daya tarik paket wisata yang mereka tawarkan. TNBTS merupakan destinasi utama di kawasan Jawa Timur, sehingga perubahan harga tiket secara signifikan dapat memengaruhi struktur biaya paket wisata.

Kutipan wawancara :

“karena kenaikan tiket yang mendadak, akhirnya yang jauh-jauh hari sudah pesan dengan harga yang lama akhirnya kami rugi dan harus segera mengganti harga paket” (N5)

sensitivitas harga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pemasaran produk wisata. Kenaikan tiket dianggap dapat menurunkan jumlah pemesanan, terutama dari wisatawan domestik berpenghasilan menengah ke bawah. Kebijakan kenaikan harga tiket yang diumumkan secara mendadak dan tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai menimbulkan ketidakpastian dalam proses penyusunan dan penjualan paket wisata. Biro wisata umumnya merancang dan menjual paket jauh hari sebelum pelaksanaan tur. Perubahan mendadak menyebabkan disrupsi dalam proses tersebut.

Kutipan wawancara:

“Kami sudah cetak brosur dan pasang harga di marketplace. Tiba-tiba harga tiket naik, pelanggan komplain dan kami terpaksa menanggung selisihnya.” (N4)

Fenomena ini menandakan perlunya perencanaan dan komunikasi yang matang antara pengelola kawasan konservasi dengan pelaku industri pariwisata. Sebagian besar pelaku biro wisata mengungkapkan ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan terkait kebijakan kenaikan tiket. Mereka merasa tidak dilibatkan atau bahkan tidak diberi informasi sebelum kebijakan tersebut

diterapkan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan lebih bersifat sepihak dan tidak partisipatif.

Kutipan wawancara:

“Kami hanya tahu dari media sosial, padahal kami ini mitra lapangan. Kalau dari awal diajak diskusi, mungkin bisa saling mengerti.” (N5)

Ketiadaan sosialisasi dari pihak TNBTS terhadap kenaikan harga tiket masuk kepada para pelaku biro wisata menimbulkan persoalan serius yang patut dicermati dari sudut pandang manajemen destinasi pariwisata. Dalam konteks ilmiah, komunikasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pariwisata yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan. kebijakan perubahan harga yang menyangkut kepentingan banyak pihak, termasuk biro perjalanan wisata sebagai aktor perantara utama antara pengelola kawasan dan wisatawan tidak disampaikan secara sistematis dan terstruktur, maka akan muncul kesenjangan informasi yang berimplikasi pada berbagai hal.

Minimnya pelibatan stakeholder berdampak pada melemahnya kepercayaan dan rasa memiliki dari pelaku pariwisata terhadap pengelolaan kawasan TNBTS. Secara normatif, pengelola TNBTS menyampaikan bahwa kenaikan tiket bertujuan untuk mendukung kegiatan konservasi, pengendalian jumlah kunjungan, dan perbaikan fasilitas. Namun, banyak biro wisata menilai bahwa alasan tersebut belum diiringi dengan perbaikan layanan yang nyata.

Kutipan wawancara:

“Harga naik tidak masalah, asal jelas peruntukannya. Tapi kami belum melihat perubahan signifikan di lapangan fasilitas masih minim, pelayanan kadang lambat, dan sistem booking online sering error.” (N5)

Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa kenaikan harga belum sebanding dengan nilai tambah yang diberikan kepada pengunjung maupun pelaku wisata. Meskipun banyak keluhan terhadap kebijakan ini, sebagian biro wisata berpandangan bahwa kebijakan kenaikan harga dapat diterima dalam jangka panjang jika benar-benar difokuskan pada pelestarian lingkungan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Kutipan wawancara:

“Kalau uang tiket dipakai untuk menjaga ekosistem Bromo, kami tentu mendukung.” (N4)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat ruang untuk membangun kesepahaman antara pengelola dan pelaku usaha, dengan syarat adanya transparansi, komunikasi yang terbuka, dan peningkatan kualitas pengalaman wisata. Sebagai bentuk respons terhadap kebijakan tersebut, beberapa biro wisata mulai melakukan penyesuaian strategi. Strategi tersebut meliputi diversifikasi produk wisata, segmentasi ulang pasar, dan peningkatan nilai tambah layanan.

Kebijakan kenaikan harga tiket masuk memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap jumlah kunjungan, khususnya pada hari-hari biasa atau *weekday*. Dalam periode non-liburan, pengunjung cenderung lebih sensitif terhadap perubahan harga. Banyak wisatawan domestik, terutama dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, menyatakan bahwa kenaikan harga menjadi pertimbangan utama dalam membatalkan atau menunda rencana kunjungan mereka. Hal ini terlihat dari penurunan volume wisatawan yang cukup jelas pada hari kerja setelah adanya penyesuaian tarif masuk.

Kutipan wawancara :

“awal-awal kenaikan tiket itu ada penurunan mbak apalagi saat hari biasa (*weekday*) kalau high season pengunjung nya jadi lebih sedikit sih mbak.” (N5)

Pelaku biro perjalanan wisata yang rutin membawa rombongan ke kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), ditemukan bahwa implementasi sistem tiket elektronik dengan metode pemindaian (*scan barcode*) di pintu masuk masih menghadapi berbagai kendala teknis yang berdampak pada kenyamanan dan kelancaran operasional lapangan. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah lambatnya respons sistem saat proses pemindaian tiket, terutama pada jam-jam sibuk ketika volume kendaraan dan jumlah pengunjung meningkat secara signifikan.

Kutipan wawancara:

“saat kebijakan wajib tiket online, dan sistem masih belum siap akhirnya terjadi kemacetan yang membuat para biro wisata ngamuk lalu demo di tempat kejadian.”

(N4)

Narasumber dari biro wisata menyampaikan bahwa sistem *scan* yang lambat tidak hanya menyebabkan antrean panjang, tetapi juga memicu kemacetan di area pintu masuk, terutama ketika akses jalan menuju kawasan terbatas dan tidak didukung manajemen lalu lintas yang optimal. Ketika sistem tidak mampu membaca *barcode* secara cepat atau mengalami gangguan jaringan, antrean kendaraan menjadi tidak terhindarkan, yang pada akhirnya mengganggu alur perjalanan wisatawan. Biro perjalanan mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa keterlambatan tersebut berdampak langsung terhadap pengalaman wisatawan, khususnya wisatawan rombongan yang telah dijadwalkan untuk mengejar momen-momen tertentu seperti *sunrise* di Penanjakan.

Beberapa pelaku biro bahkan mengaku harus melakukan negosiasi ulang dengan wisatawan atau memberikan kompensasi akibat keterlambatan masuk yang di luar kendali mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara sistem teknologi yang diterapkan dengan kesiapan infrastruktur dan kapasitas manajemen di lapangan dapat menimbulkan resistensi dan keluhan dari *stakeholder*, khususnya biro wisata yang memiliki kepentingan langsung terhadap kelancaran layanan. Meskipun secara prinsip mereka mendukung digitalisasi sistem tiket sebagai bagian dari upaya modernisasi dan efisiensi, para pelaku biro berharap adanya peningkatan kualitas sistem, baik dari segi kecepatan, stabilitas jaringan, maupun kapasitas pelayanan petugas di lapangan. Dengan demikian, respon biro wisata terhadap sistem scan tiket yang lemot bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap teknologi, melainkan kritik konstruktif yang muncul dari kebutuhan akan sistem yang lebih responsif, andal, dan mampu beradaptasi dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perwakilan biro perjalanan wisata yang secara rutin mengelola paket kunjungan ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), diperoleh temuan bahwa secara umum mereka menyatakan sikap setuju terhadap kebijakan kenaikan harga tiket masuk kawasan

tersebut. Para pelaku biro wisata memahami bahwa peningkatan tarif merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan, termasuk dalam hal pelestarian lingkungan, pengawasan aktivitas wisata, serta penataan kawasan. Namun demikian, dukungan terhadap kenaikan tarif tersebut disertai dengan harapan yang kuat agar pihak pengelola TNBTS juga melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas umum yang dinilai masih kurang memadai.

Beberapa informan menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang sering dikeluhkan wisatawan adalah terbatasnya jumlah toilet umum yang bersih dan layak, terutama di area-area ramai seperti Seruni Point, Penanjakan, serta kawasan parkir Cemoro Lawang. Selain itu, persoalan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata juga menjadi sorotan utama.

Kutipan wawancara:

“kalau harga tiket naik, kami berharap nya fasilitas juga di benahi mbak, seperti fasilitas toilet gratis untuk wisatawan, penambahan pembatas jalan, perlebaran jalan dan juga penambahan lampu di jalan.” (N4)

Jalan yang sempit dan tidak dilengkapi dengan pembatas maupun lampu penerangan jalan dinilai membahayakan, terutama pada malam hari atau saat kondisi kabut tebal. Para pelaku biro wisata berharap agar ada pelebaran jalan pada titik-titik rawan kemacetan dan pengaturan lalu lintas yang lebih baik untuk menghindari penumpukan kendaraan, khususnya saat musim liburan. Mereka juga menekankan pentingnya pemasangan pembatas jalan dan lampu penerangan yang memadai demi keselamatan pengunjung, mengingat akses menuju kawasan Bromo memiliki kontur jalan yang curam dan berliku.

Pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penerimaan terhadap kebijakan tarif baru, biro wisata sebagai salah satu pemangku kepentingan tetap memandang pentingnya transparansi dalam penggunaan dana dari hasil kenaikan tiket tersebut. Harapan mereka tidak hanya berhenti pada peningkatan estetika kawasan, tetapi juga pada aspek fungsional yang langsung dirasakan manfaatnya oleh wisatawan. Dengan demikian, penerimaan biro wisata terhadap kenaikan harga tiket di TNBTS bersifat kondisional, yakni dengan catatan bahwa peningkatan tarif

harus diimbangi oleh peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur publik yang ada di dalam kawasan

3. Persepsi wisatawan terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Dalam konteks pariwisata alam, persepsi wisatawan terhadap kebijakan harga merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi keputusan kunjungan serta tingkat kepuasan wisatawan. Kenaikan harga tiket masuk di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menimbulkan beragam respons dari wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, serta motivasi kunjungan mereka.

Menurut Pitana & Gayatri (2005), sebelum melakukan perjalanan wisata, calon wisatawan melalui proses mental yang melibatkan berbagai pertimbangan, seperti kapan melakukan perjalanan, berapa lama, ke mana tujuan, dan dengan cara apa perjalanan dilakukan. Proses pengambilan keputusan ini memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata, karena berbagai faktor yang memengaruhi keputusan tersebut dapat diarahkan melalui upaya promosi atau pemasaran wisata. Memahami proses pengambilan keputusan ini tidak hanya krusial sebagai dasar strategi promosi, tetapi juga penting dalam perencanaan produk wisata serta penentuan segmentasi pasar atau target pemasaran. Hal ini menjadi semakin signifikan dalam kondisi persaingan yang ketat, terutama ketika pasar sudah terbagi menjadi segmen-segmen yang spesifik.

Sebagian besar wisatawan menilai bahwa kenaikan harga tiket masih dapat diterima apabila disertai dengan peningkatan kualitas layanan dan fasilitas. Mereka mengaitkan harga tiket dengan nilai pengalaman yang diperoleh, terutama keindahan alam, kualitas jalanan menuju objek wisata, serta fasilitas umum seperti toilet.

Kutipan wawancara :

“kenaikan tiket yang dibuat pemerintah karena untuk pelestarian sih saya setuju, tetapi saya juga berharap dengan kenaikan tersebut pemerintah juga membenahi beberapa fasilitas yang ada di Bromo ini.” (N1)

Namun, ada pula wisatawan yang merasa bahwa kenaikan harga tiket tidak sebanding dengan fasilitas yang disediakan, terutama jika infrastruktur seperti toilet, tempat sampah, dan jalur trekking masih dinilai kurang memadai.

Kutipan wawancara :

“dengan harga tiket yang segitu, untuk ma uke toilet, saya harus bayar lagi 5.000 lalu toilet hanya ada di area warung. Jadi agak sulit.” (N2)

Sebagian wisatawan bersikap positif terhadap kebijakan kenaikan tiket apabila dana yang diperoleh dialokasikan untuk konservasi dan pelestarian lingkungan. Kesadaran ekologis memainkan peran penting dalam membentuk persepsi ini, khususnya di kalangan wisatawan milenial dan generasi Z yang lebih peduli terhadap isu keberlanjutan.

Kenaikan harga tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memunculkan berbagai persepsi di kalangan wisatawan, sebagian besar wisatawan memandang kenaikan tarif sebagai bentuk komersialisasi yang dapat mengancam inklusivitas akses terhadap sumber daya alam publik, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Dalam wawancara yang dilakukan secara terbuka di lapangan, banyak wisatawan domestik menyatakan bahwa kenaikan tarif seharusnya disertai dengan transparansi pengelolaan dan peningkatan kualitas layanan publik, seperti fasilitas sanitasi, kebersihan kawasan dan sistem informasi yang memadai.

Persepsi terhadap nilai (*perceived value*) menjadi faktor utama dalam membentuk sikap wisatawan: apabila harga tiket dianggap sepadan dengan pengalaman yang diperoleh, maka tarif tinggi tetap dapat diterima. Sebaliknya, apabila wisatawan merasa tidak mendapatkan peningkatan layanan, maka kenaikan harga akan dianggap sebagai tindakan eksplotatif. Selain itu, narasi konservasi yang sering dijadikan dasar oleh pihak pengelola untuk menaikkan tarif tiket juga dipertanyakan oleh sebagian pengunjung, terutama karena kurangnya bukti konkret yang menunjukkan alokasi dana secara langsung untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Dalam beberapa laporan media (Kompas, 2023; DetikTravel, 2023), sejumlah wisatawan menyampaikan keberatan mereka terhadap struktur harga yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal, khususnya warga sekitar kawasan

TNBTS yang juga bergantung pada sektor pariwisata. Persepsi ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap persepsi wisatawan menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan harga yang tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan ekologis kawasan taman nasional.

Kutipan wawancara:

“saya terakhir ke Bromo itu harga tiket masih 30 an masih banyak jalanan yang sangat jelek dan saya kesini lagi saat harga tiket sudah naik beberapa jalanan sudah di aspal. Jadi ya saya berharap nya makin banyak fasiliat yang makin bagus kedepannya.” (N1)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, ditemukan bahwa sebagian besar wisatawan menyatakan persetujuan terhadap kebijakan kenaikan harga tiket masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dengan catatan bahwa kebijakan tersebut dilandasi oleh alasan yang jelas dan berorientasi pada tujuan pelestarian lingkungan. Para informan yang memiliki tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi cenderung memahami bahwa sebagai kawasan konservasi yang dilindungi negara, TNBTS menghadapi berbagai tantangan ekologis yang memerlukan biaya pengelolaan tidak sedikit. Mereka berpendapat bahwa tingginya angka kunjungan wisatawan dapat memberikan tekanan terhadap ekosistem, dan oleh karena itu, diperlukan sistem pembatasan dan pengendalian yang salah satunya dapat dilakukan melalui mekanisme tarif.

Kenaikan tiket dalam konteks ini dianggap bukan semata-mata sebagai bentuk komersialisasi, melainkan sebagai instrumen pengelolaan berkelanjutan (*sustainable management*), dana yang diperoleh masuk pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam PP 12/36 2024. Namun demikian, meskipun menyatakan persetujuan terhadap kebijakan tersebut, narasumber juga mengemukakan adanya harapan kuat terhadap peningkatan fasilitas umum di dalam kawasan wisata.

Fasilitas penunjang seperti toilet umum, tempat sampah, dan papan informasi edukatif masih belum sepenuhnya tersedia atau dalam kondisi kurang terawat. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kenaikan harga tiket tidak serta-merta diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengunjung. Dalam konteks tersebut, wisatawan mengharapkan bahwa adanya kenaikan harga tiket harus sejalan dengan peningkatan standar pelayanan minimal (SPM) wisata alam, yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan informasi yang memadai mengenai kawasan konservasi.

Kutipan wawancara :

“saya sih pinginnya diperbanyak toilet, lalu penambahan lampu di sepanjang jalan menuju ke Bromo dan juga pelebaran jalan.” (N3)

Narasumber menyatakan bahwa mereka bersedia membayar lebih, bahkan dengan tarif yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, asalkan ada perbaikan nyata di lapangan. Mereka mengusulkan agar pihak pengelola TNBTS, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) maupun Balai Besar TNBTS, memberikan laporan rutin atau *update* publik mengenai perkembangan ekowisata , misalnya melalui media sosial resmi, papan informasi digital, atau situs web. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga merasa dilibatkan secara aktif dalam proses konservasi dan pengembangan kawasan. Selain itu, para informan juga menekankan pentingnya kehadiran fasilitas edukatif seperti pusat informasi (*visitor center*), pemandu wisata bersertifikat, serta aktivitas interpretasi lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap nilai ekologis kawasan Bromo Tengger Semeru.

Perspektif wisatawan yang mendukung kenaikan tarif, terdapat pemahaman bahwa harga yang tinggi dapat berfungsi sebagai filter alami untuk mengurangi *overtourism* atau ledakan jumlah pengunjung yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan kata lain, tarif yang lebih tinggi dapat membatasi kunjungan massal tanpa kontrol dan mendorong segmen wisatawan yang lebih bertanggung jawab (*responsible travelers*). Namun mereka juga menekankan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan mekanisme subsidi silang atau insentif khusus bagi kelompok

masyarakat lokal, pelajar, serta komunitas pemerhati lingkungan agar tetap dapat mengakses kawasan konservasi ini. Sebab, pelestarian lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk wisatawan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Sejarah kenaikan harga di TNBTS dalam PP Nomor 12 Tahun 2014

Sektor pariwisata merupakan salah satu bidang yang memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan, baik dalam lingkup kecil maupun besar, dengan jangkauan yang mencakup tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Selain berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia, pariwisata juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar kawasan wisata. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi juga menyentuh masyarakat lapisan bawah yang secara langsung dapat terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti berdagang makanan, menjual oleh-oleh dan merchandise, menyediakan jasa transportasi, penginapan, maupun layanan lainnya yang mendukung kebutuhan wisatawan.

Kehadiran sektor pariwisata mampu menjadi solusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dengan menyediakan beragam kegiatan produktif yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dengan kata lain, pariwisata memiliki fungsi multifungsi: selain sebagai sarana rekreasi, ia juga menjadi penggerak ekonomi lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pengembangan sektor ini perlu terus dilakukan agar pariwisata dapat bersaing dengan sektor-sektor lain dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi. Dampak positif dari pengembangan tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan masyarakat, serta bertambahnya penerimaan daerah, negara, hingga devisa. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan (stakeholder), mengingat luasnya cakupan aktivitas pariwisata.

Indonesia sendiri memiliki potensi wisata yang sangat beragam, mulai dari wisata alam, wisata bahari, wisata hutan (wana wisata), wisata edukasi, hingga wisata sejarah dan budaya (Kusrini et al., 2008). Objek wisata, menurut definisi Serambi News, merupakan tempat atau lokasi yang dapat dikunjungi untuk kegiatan wisata, sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan objek wisata sebagai bentuk nyata dari seni, budaya, alam, tata kehidupan, maupun sejarah yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung (Bakri, 2016). Apabila dikelola secara optimal, objek wisata dapat memberikan keuntungan besar tidak hanya bagi masyarakat sekitar, tetapi juga bagi daerah melalui kontribusi ekonomi yang dihasilkannya, termasuk penciptaan lapangan kerja baru (Waluyo, Feryanto, & Haryanto, 2008).

Dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat peran sektor pariwisata dalam perekonomian nasional. Sejalan dengan pandangan Horwarth dalam Priatmoko, Djaja, & Winarno (2020), peningkatan pendapatan daerah dapat dicapai melalui sinergi antara masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah dalam menggali potensi lokal yang ada untuk mengoptimalkan sumber pendapatan dari berbagai sektor. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa sektor pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah semata, melainkan juga pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan pariwisata memiliki dimensi sosial-ekonomi yang luas, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Hutan memiliki peran penting sebagai penyedia jasa lingkungan, salah satunya sebagai kawasan rekreasi alam, yang dapat memberikan manfaat baik melalui fungsi ekosistem alami maupun buatan. Nilai dan manfaat tersebut tidak hanya dinikmati oleh pemilik hutan, tetapi juga oleh berbagai pemangku kepentingan serta masyarakat luas (Brey, Riera, & Mogas, 2007). Pemanfaatan jasa lingkungan hutan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengembangan wisata alam, kegiatan olahraga berbasis tantangan, pemanfaatan sumber daya air,

perdagangan karbon (*carbon trade*), hingga program pelestarian hutan dan lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas hidup, dan naiknya pendapatan per kapita, kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas wisata juga terus meningkat. Douglass (1982) menyatakan bahwa setelah berakhirnya Perang Dunia II, khususnya di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat, kebutuhan akan rekreasi semakin terasa dan sangat bergantung pada keberadaan rekreasi alam. Peningkatan permintaan terhadap wisata berbasis alam mendorong bertambahnya kebutuhan destinasi wisata, sarana transportasi, infrastruktur pendukung, serta sektor pariwisata lain yang terkait.

Pemerintah telah menetapkan aturan untuk mengatur pengelolaan wisata alam di berbagai kawasan konservasi, termasuk suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Kawasan wisata alam yang mempertahankan karakter dan keaslian lingkungannya, seperti taman wisata alam, hutan kota, cagar alam, taman buru, sungai, danau, maupun taman laut, menjadi pilihan utama bagi para wisatawan. Berdasarkan survei, lebih dari 206 juta orang berusia 15 tahun ke atas memilih aktivitas rekreasi di luar ruangan, dengan sebagian besar aktivitas tersebut berfokus pada wisata alam, khususnya di hutan dan taman (Cordell, Betz, & Green, 2002).

Sejarah kenaikan tarif di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berkaitan erat dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi yang berlandaskan regulasi pemerintah pusat. Salah satu momen penting terjadi saat pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 mengenai Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Regulasi tersebut menjadi titik awal penyesuaian tarif masuk kawasan konservasi, termasuk TNBTS, yang sebelumnya relatif stabil selama beberapa tahun. Kenaikan harga tiket masuk pada masa itu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan fiskal untuk meningkatkan kontribusi PNBP dari sektor kehutanan dan konservasi, tetapi juga ditujukan untuk mendorong prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemanfaatan kawasan wisata alam. Penerapan PP No. 12 Tahun 2014 menandai adanya transformasi paradigma bahwa kawasan konservasi, selain berfungsi melestarikan ekosistem, juga memiliki potensi

ekonomi yang dapat dioptimalkan secara legal untuk mendukung pendanaan konservasi. Namun, perubahan tarif ini sempat menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat dan pelaku wisata, terutama karena terjadi penyesuaian harga yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, fasilitas, serta layanan wisata, tetapi di sisi lain memunculkan perdebatan mengenai keterjangkauan harga bagi wisatawan domestik yang menjadi segmen terbesar pengunjung TNBTS. Dengan demikian, sejarah kenaikan harga melalui implementasi PP No. 12 Tahun 2014 dapat dipandang sebagai tonggak penting dalam kebijakan pengelolaan TNBTS yang mengedepankan keseimbangan antara fungsi konservasi, keberlanjutan ekonomi, serta aksesibilitas wisata alam bagi masyarakat luas.

Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014, tarif tiket masuk kawasan wisata alam di dalam kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) relatif rendah dan cenderung stagnan. Misalnya, sebelum perubahan tarif, tarif tiket untuk wisatawan nusantara pada hari biasa masih berada di angka Rp 10.000 per orang, Sementara itu, untuk wisatawan mancanegara, tarif awalnya tercatat sekitar Rp 72.500 perorang.

Setelah PP No. 12 Tahun 2014 diterapkan dalam rangka menyesuaikan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan dan kawasan konservasi terjadi lonjakan signifikan pada tarif tiket tersebut. Ketua Balai Besar TNBTS pada masa itu menyebutkan bahwa tarif baru untuk wisatawan nusantara dinaikkan dari Rp 10.000 menjadi Rp 37.500 untuk hari biasa, sementara pada hari libur menjadi Rp 67.500. Untuk wisatawan mancanegara, tarif dinaikkan dari Rp 72.500 menjadi Rp 267.500 pada hari biasa.

PP 36/2024 diberlakukan untuk menggantikan PP No. 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor kehutanan dan konservasi, dengan tujuan menyesuaikan regulasi terhadap perkembangan kondisi ekonomi, lingkungan, dan organisasi kelembagaan KLHK. Pengaturan tiket masuk kawasan konservasi (termasuk taman nasional) dilihat sebagai salah satu jenis PNBP (penerimaan negara bukan pajak), di mana PP

36/2024 secara eksplisit memasukkan “tiket masuk pengunjung di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam” sebagai salah satu jenis penerimaan yang harus diatur tarifnya. Dengan regulasi baru ini, tarif tiket dan jenis pungutan lainnya (seperti penggunaan fasilitas, tarif kendaraan, aktivitas wisata alam, penggunaan drone, pengambilan video komersial) diselaraskan agar lebih sistematis, transparan, dan mendukung kelestarian kawasan.

Penetapan tarif tiket menurut PP 36/2024 tidak semata-mata berdasar keputusan administratif semata, melainkan menggunakan beberapa prinsip dan komponen teknis sebagai pijakan agar tarif yang dikenakan proporsional, rasional, serta berkelanjutan. Beberapa aspek yang menjadi dasar perumusan tarif adalah: PP 36/2024 mengamanatkan bahwa tiket masuk kawasan konservasi termasuk taman nasional harus dibedakan menurut kelas. Dengan demikian, tidak ada tarif tunggal untuk semua kawasan; melainkan ditentukan berdasarkan kelas kawasan atau destinasi wisata alam menurut Pasal 5 ayat 1. Tarif tiket masuk nantinya akan mempertimbangkan kategori wisatawan domestik maupun mancanegara dan periode hari biasa atau hari libur. Hal ini terlihat dari praktik penerapan di TNBTS sesuai PP 36/2024: misalnya, tarif wisatawan Nusantara pada hari kerja dan hari libur berbeda, serta tarif wisatawan mancanegara diberlakukan secara tunggal untuk hari kerja dan libur. Tarif yang diumumkan untuk TNBTS berdasarkan penyesuaian PP 36/2024 mencakup tidak hanya akses kawasan, tetapi juga komponen asuransi.

Meskipun PP 36/2024 lebih mengatur jenis dan tarif PNBP, dalam praktik pengelolaan kawasan konservasi seperti TNBTS, penerapan kuota kunjungan dan kajian daya dukung yang menggunakan *Effective Carrying Capacity* tetap menjadi acuan agar tarif bukan sekadar pemungutan, tetapi juga instrumen pengelolaan agar jumlah pengunjung tidak merusak ekosistem alamiah. Dengan PP 36/2024, pengelola kawasan konservasi diwajibkan agar tarif yang diterapkan dapat dipertanggungjawabkan, transparan bagi publik, serta mendukung efisiensi pengumpulan, pencatatan, dan penyetoran PNBP ke kas negara. PP tersebut juga menetapkan bahwa seluruh penerimaan PNBP KLHK harus disetorkan ke kas negara.

4.3.2 Analisis Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam PP Nomor 36 tahun 2024

Regulasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi faktor terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2024 terutama menyusul perubahan struktur organisasi dan tuntunan untuk optimalisasi penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional. Sebelumnya, KLHK masih menggunakan berbagai PP lama dari tahun 2014 yaitu PP Nomor 12 Tahun 2014 untuk Kementerian Kehutanan, PP Nomor 33 Tahun 2014 untuk penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan Pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan PP Nomor 44 Tahun 2014 untuk KLH yang diketahui sudah tidak selaras dengan dinamika pengelolaan hutan, kebutuhan pengaturan izin serta tuntutan pengelolaan fiskal dan lingkungan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2024 merupakan kebijakan baru yang mengatur tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Salah satu substansi penting dalam PP ini adalah penyesuaian tarif layanan yang diberikan oleh negara di sektor konservasi sumber daya alam, termasuk tarif masuk kawasan taman nasional, seperti yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

Pemerintah menyadari bahwa tarif dan jenis-jenis PNBP harus diperbarui agar sesuai dengan prinsip keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan efisiensi administrasi, serta dapat memberikan insentif yang tepat dan efektif terhadap kerusakan lingkungan atau pelanggaran regulasi. Dalam prosesnya, pemerintah terlebih dahulu melakukan kajian regulasi dan tarif, melibatkan analisis dampak ekonomi dan lingkungan, estimasi potensi penerimaan, konsultasi lintas instansi (KLHK, Kementerian Lingkungan, Lembaga teknis terkait).

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dikelola oleh Balai Besar TNBTS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional. Sebagai unit pengelola, Balai Besar TNBTS memiliki tanggung jawab utama dalam

melestarikan sumber daya alam dan ekosistem kawasan, serta berada di bawah koordinasi langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Alam. Keindahan kawasan ini menjadikannya destinasi wisata populer, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tabel 4.2 Jumlah Pengunjung Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

No.	Tahun	Lokal	Luar Negeri	Total Pengunjung	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1.	2019	699.021	22.061	721.082	23,6 Miliar
	2020	206.469	2.589	209.058	6,41 Miliar
3.	2021	180.002	268	180.270	4,85 Miliar
4.	2022	322.571	8.644	331.215	11,6 Miliar
5.	2023	355.297	13.210	368.507	14.7 Miliar

Sumber : Balai Besar TNBTS,2024.

Berdasarkan data kunjungan, jumlah wisatawan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan, selama liburan akhir tahun 2023 (24 Desember 2023–3 Januari 2024), pengelola menambah kuota pengunjung menjadi 3.500 orang per hari. Kepala Balai Besar TNBTS menyatakan bahwa jumlah tersebut masih sesuai dengan kapasitas kawasan dan bertujuan untuk menjaga kenyamanan para wisatawan.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan salah satu taman nasional yang memiliki banyak flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, Balai Besar TNBTS memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung untuk mencegah overtourism dan kerusakan ekosistem. Lonjakan wisatawan, terutama saat musim liburan, dapat menimbulkan degradasi lingkungan, seperti peningkatan sampah dan tekanan pada flora maupun fauna. Untuk mengatasi hal ini, pengelola TNBTS menerapkan sistem kuota pengunjung agar tidak melebihi kapasitas daya dukung lingkungan. Selain itu, program edukasi dan kampanye kesadaran

lingkungan terus dijalankan untuk menumbuhkan tanggung jawab wisatawan dalam menjaga kebersihan serta kelestarian alam.

Pada tahun yang sama, tepatnya 6 September 2023, terjadi peristiwa kebakaran besar di kawasan Gunung Bromo akibat kelalaian pengunjung yang menggunakan flare atau suar saat melakukan sesi pemotretan pra-pernikahan. Kebakaran ini menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem, termasuk padang savana, semak belukar, dan sebagian hutan di sekitar kawasan TNBTS. Kondisi cuaca kering serta angin kencang mempercepat penyebaran api sehingga menyulitkan proses pemadaman. Dampaknya, akses menuju sejumlah destinasi wisata populer ditutup sementara demi keselamatan pengunjung dan kelancaran upaya penanggulangan kebakaran. Insiden ini tidak hanya mengganggu kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap sektor pariwisata, yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat sekitar.

Peristiwa kebakaran tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan wisata alam yang lebih ketat guna mencegah aktivitas wisatawan yang berpotensi memicu bencana lingkungan. Diperlukan langkah nyata berupa edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran aturan demi menjaga keberlanjutan kawasan konservasi. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab Balai Besar TNBTS menjadi sangat strategis, tidak hanya dalam pengelolaan dan pelestarian kawasan, tetapi juga dalam upaya pencegahan serta penanganan kejadian serupa agar tidak kembali terulang di masa depan.

Rancangan PP disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia: antara lain UU Nomor 9 tahun 2018 tentang PNBP, yang menetapkan kerangka hukum untuk jenis dan tarif non-pajak serta PP Nomor 69 tahun 2020 tentang tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP. Rancangan PP 36/2024 resmi ditetapkan pada tanggal 30 September 2024 dengan menyebutkan secara rinci jenis-jenis PNBP (iuran perizinan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, pungutan hasil usaha, pungutan risiko kerusakan lingkungan, denda administrasi dan lain lain).

Aturan peralihan dari ketentuan-ketentuan PP lama, setelah ditetapkan PP diundangkan dalam lembaran Negara dan mulai berlaku 30 hari setelah

pengundangan. Pemerintah juga menetapkan bahwa seluruh penerimaan PNBP yang diatur dalam PP 36/2024 wajib disetor ke kas negara dan bahwa implementasi tarif dan jenis-jenis yang diatur akan dipantau serta disesuaikan jika diperlukan agar sesuai dengan realitas lapangan.

Tujuan utama dari kebijakan ini secara normatif adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor lingkungan terhadap pendapatan negara, mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa konservasi lingkungan dapat dibiayai secara mandiri melalui PNBP. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara aspek pendapatan negara, kelestarian lingkungan, dan keadilan bagi pemangku kepentingan sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari respons masyarakat yang sangat beragam, terutama mereka yang melakukan kegiatan wisata di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Tabel 4.3 Harga tiket masuk TNBTS setelah kenaikan tarif

WNI		WNA	
Hari Kerja		Hari Kerja	Hari Libur
54.000		255.000	255.000
79.000			

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2025

Tabel 4.4 Harga Tiket masuk TNBTS sebelum kenaikan tarif

WNI		WNA	
Hari Kerja		Hari Kerja	Hari Libur
29.000		220.000	255.000
34.000			

Sumber: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2025

Konteks dalam pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), pembagian dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki mekanisme yang diatur secara terstruktur melalui kerangka regulasi pemerintah. Seluruh dana yang diperoleh dari tiket masuk wisatawan maupun aktivitas wisata lainnya pertama-tama disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari PNBP. Dana ini

kemudian masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk selanjutnya didistribusikan kembali melalui mekanisme anggaran kepada unit pelaksana teknis (UPT) seperti Balai Besar TNBTS. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pengelolaan kawasan, mulai dari kegiatan konservasi sumber daya alam hayati, perbaikan dan pembangunan fasilitas pendukung wisata, hingga program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan taman nasional. Dari perspektif kualitatif, mekanisme ini menggambarkan bahwa meskipun dana PNBP berasal langsung dari kontribusi wisatawan, proses pemanfaatannya melalui sistem sentralisasi negara bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kendala keterbatasan anggaran yang kembali ke UPT dibandingkan dengan besarnya pemasukan yang dihasilkan, sehingga pengelolaan dan pelayanan wisata belum selalu optimal. Hal ini menegaskan perlunya sinergi antara pengelola taman nasional, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lain agar distribusi dana PNBP tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap keberlanjutan ekosistem, peningkatan kualitas pelayanan wisata, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi sekaligus pengembangan pariwisata. Anggaran ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari perawatan infrastruktur dasar seperti jalan akses, jalur trekking, papan informasi, hingga penyediaan fasilitas penunjang wisatawan seperti toilet, tempat parkir, serta pusat informasi. Selain itu, dana APBN juga dialokasikan untuk program konservasi, termasuk pemulihian ekosistem, perlindungan flora dan fauna endemik, serta upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang kerap terjadi di kawasan TNBTS. Tidak hanya itu, anggaran ini dimanfaatkan pula untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui pelatihan pemandu lokal, pengembangan homestay, serta dukungan bagi UMKM berbasis wisata. Dengan demikian, dana APBN tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian lingkungan, tetapi

juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan wisata dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, keberadaan dana APBN menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa TNBTS dapat dikelola secara berkelanjutan, memenuhi kebutuhan wisatawan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pembangunan ekonomi lokal.

Pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada instansi di bawahnya selalu memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah atau instansi terkait di wilayah administrasinya, terutama dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Relasi ini sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan keberhasilan pengelolaan destinasi tersebut. Dalam konteks Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), hubungan pengelolaan melibatkan Balai Besar TNBTS, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta pelaku jasa wisata. Selain itu, Balai Besar TNBTS juga berada di bawah pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Pemerintah Kabupaten Malang memiliki kewenangan khusus untuk mendukung pengelolaan pariwisata di TNBTS melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang merupakan bentuk desentralisasi (Maddick, 1963). Karena sebagian wilayah TNBTS berada dalam administrasi Kabupaten Malang, pemerintah kabupaten perlu berkontribusi, meskipun pengelolaan utama tetap berada di tangan Balai Besar TNBTS. Peran pemerintah Kabupaten Malang lebih bersifat mendukung melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang, seperti pembangunan Bandara Abdul Rahman Saleh, perbaikan jalan, serta pembangunan sub-jalan untuk mempermudah akses wisatawan ke Malang dan meningkatkan kunjungan wisata.

Sumber pendapatan Balai Besar TNBTS sebagian besar berasal dari sektor wisata melalui retribusi (PNBP), yang hanya sekitar 30% dari kebutuhan anggaran. Pendapatan ini sepenuhnya diserahkan ke pemerintah pusat tanpa tambahan atau pengurangan. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk gaji pegawai saja mencapai sekitar Rp 8 miliar, ditambah biaya operasional pemeliharaan kawasan konservasi yang cukup besar. Karena dana yang ada hanya cukup untuk gaji dan

pemeliharaan kawasan, Balai Besar TNBTS tetap membutuhkan dukungan dari pihak swasta atau sponsor untuk memenuhi kebutuhan tambahan, seperti pembangunan infrastruktur.

Tugas utama Balai Besar TNBTS adalah memelihara dan menjaga konservasi TNBTS, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang lebih fokus pada promosi wilayah pariwisata, yang berpotensi mendorong wisata massal. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip ekowisata, yang bertujuan menjaga ekosistem serta melindungi flora dan fauna di kawasan konservasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi TNBTS adalah pengelolaan sampah, yang menjadi faktor utama kerusakan lingkungan.

4.3.3 Persepsi Pengelola Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dikelola langsung oleh Balai Besar TNBTS, yang memperoleh kewenangan khusus dari pemerintah pusat dan berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar TNBTS juga terlibat dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan taman nasional ini, dengan tugas utama mengelola kawasan konservasi secara menyeluruh. Menurut Rahma dalam Malangvoice (2016), seluruh pendapatan dari sektor wisata langsung disetorkan ke pemerintah pusat tanpa adanya pembagian dengan pihak lain, sementara kebijakan anggaran sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat dan Balai Besar hanya dapat mengajukan rencana program yang akan dilaksanakan.

Balai Besar TNBTS menyelenggarakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem serta pengelolaan kawasan taman nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Balai Besar TNBTS, 2016). Pengelolaan taman nasional ini juga melibatkan pemerintah daerah setempat; misalnya, Pemerintah Kabupaten Malang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pengelolaan destinasi pariwisata TNBTS.

Balai Besar TNBTS resmi dibentuk pada 1 Februari 2007 melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional. Sebelumnya bernama Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, lembaga ini kemudian diubah menjadi Balai

Besar TNBTS (BBTNBTS). Struktur organisasi BBTNBTs terdiri dari dua bidang pengelolaan, empat seksi pengelolaan taman nasional (SPTN), dan 12 resort.

Dengan kewenangan dari pemerintah pusat, Balai Besar TNBTS bertugas menyusun Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) yang berfungsi sebagai pedoman dan strategi pengelolaan ke depan. RPTN telah disusun sejak 1995 hingga 2020. Keanekaragaman flora, fauna, dan lingkungan alam TNBTS menjadi faktor penting dalam pengelolaan yang dilakukan Balai Besar. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya hutan bertujuan menjaga kelestarian hayati dan keseimbangan ekosistem, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia (Renstra BBTNBTs, 2017).

Hasil wawancara mendalam dan observasi peneliti menunjukkan bahwa Balai Besar TNBTS pada dasarnya menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024, yang menetapkan kenaikan tarif masuk sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor lingkungan hidup. Secara kelembagaan, BBTNBTs diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Otl.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, bertugas sebagai unit pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam.

TNBTS menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia karena keindahan lanskapnya yang menakjubkan, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain panorama alam, kawasan ini juga kaya akan budaya, terutama tradisi masyarakat Suku Tengger yang masih terjaga, seperti upacara Yadnya Kasada yang digelar setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur.

Potensi wisata yang besar menjadikan TNBTS layak untuk terus dikembangkan, dengan catatan pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor pariwisata. Keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini juga menjadi

daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing, sehingga tidak mengherankan bila TNBTS tercatat sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia.

Data kunjungan menunjukkan bahwa pada tahun 2018 jumlah wisatawan mencapai 825.206 orang (800.130 domestik dan 25.076 mancanegara) dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp26,1 miliar. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung sedikit menurun menjadi 721.082 orang (699.021 domestik dan 22.061 mancanegara) dengan PNBP sebesar Rp23,6 miliar. Dampak signifikan terjadi pada masa pandemi Covid-19, ketika jumlah pengunjung menurun drastis menjadi 209.058 orang di tahun 2020 (206.469 domestik dan 2.589 mancanegara) dengan PNBP hanya Rp6,41 miliar, bahkan kembali turun pada 2021 menjadi 180.270 orang (180.002 domestik dan 268 mancanegara) dengan PNBP sebesar Rp4,85 miliar. Situasi ini menggambarkan penurunan tajam dibandingkan dengan tahun 2018, yang sebelumnya mencatat PNBP tertinggi. Kondisi tersebut juga diberitakan secara luas, salah satunya oleh KompasTV, yang menyoroti keterpurukan pendapatan sektor wisata akibat pembatasan kunjungan selama pandemi.

Pengelola tidak memiliki kewenangan dalam menentukan besar kecilnya tarif, karena semua telah ditetapkan secara normatif oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini menegaskan bahwa Balai Besar TNBTS lebih berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan yang mentaati pada struktur kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, pengelola menyadari adanya resistensi wisatawan dan pelaku wisata, namun pihak Balai Besar menekankan bahwa kewajiban utama mereka adalah menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan sekaligus mengelola dampak sosialnya secara terbatas melalui sosialisasi dan koordinasi sosial.

Balai besar TNBTS hanya bertugas untuk menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut di lapangan. Dalam berbagai pernyataan hasil wawancara, pihak pengelola menyatakan bahwa pihak Balai Besar tidak memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi, atau menunda pemberlakuan kenaikan tarif, karena kebijakan ini sepenuhnya ditetapkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bagian dari penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan wisata, pihak pengelola juga melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan pemandu lokal, pengelola homestay, serta pelaku UMKM di Desa Wonokitri. Program ini mencakup pembekalan narasi budaya Suku Tengger, peningkatan pelayanan wisata, serta pemahaman konservasi lingkungan agar wisatawan memperoleh pengalaman tidak hanya bersifat rekreatif, tetapi juga edukatif. Upaya tersebut mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pariwisata berkelanjutan sekaligus memperkuat peran mereka sebagai aktor utama dalam ekosistem wisata konservasi. Di samping itu, pengelolaan destinasi juga didukung oleh kolaborasi lintas sektor antara Balai Besar TNBTS, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Bentuk kerja sama ini terlihat dalam pengaturan kuota kunjungan, pengelolaan jalur jeep, serta manajemen homestay oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Melalui koordinasi yang baik, masyarakat setempat terlibat langsung dalam pengelolaan transportasi dan fasilitas wisata sehingga tercipta rasa memiliki terhadap kawasan sekaligus keseimbangan antara kepentingan konservasi dan pelayanan wisata. Kolaborasi ini tidak hanya menjaga keberlanjutan destinasi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi berbasis lokal.

Pengelola mengaku memahami kegelisahan biro wisata dan juga wisatawan, terutama karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi di awal pemberlakuan tarif. Pengelola menyebutkan bahwa keterbatasan tersebut bukan karena kelalaian, melainkan karena kebijakan kenaikan tarif diputuskan secara cepat oleh pemerintah pusat.

Meskipun secara kelembagaan pengelolaan TNBTS telah tersusun dengan baik, namun kualitas tata kelola di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius. Permasalahan yang muncul antara lain tindakan vandalisme, pembuangan sampah sembarangan, pelanggaran terhadap aturan zonasi, serta lonjakan jumlah pengunjung yang sering kali melebihi kapasitas daya dukung kawasan. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan salah satu pegawai Resort, Bapak Marianto, yang menegaskan bahwa pengawasan menjadi sulit dilakukan terutama

pada musim puncak kunjungan. Wisatawan kerap kali tidak mematuhi aturan, seperti membuka jalur baru secara sembarangan dan menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap dampak lingkungan. Hal ini menandakan perlunya strategi pengawasan yang lebih ketat sekaligus penguatan edukasi bagi pengunjung agar kesadaran konservasi dapat ditingkatkan. Selain itu, tantangan lain juga ditemukan pada aspek partisipasi masyarakat, terutama di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan taman nasional. Rendahnya keterlibatan masyarakat di wilayah tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi, edukasi, serta akses terhadap informasi mengenai manfaat pariwisata berbasis konservasi. Akibatnya, distribusi manfaat dari pengelolaan wisata belum sepenuhnya merata dan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial. Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Jumlah personel pengawasan yang terbatas serta keterbatasan dana menyebabkan pembangunan fasilitas pendukung, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun kegiatan sosialisasi belum berjalan secara optimal. Dampaknya, efektivitas pengelolaan wisata dan kualitas pelayanan bagi pengunjung masih belum maksimal. Oleh karena itu, upaya perbaikan tata kelola melalui peningkatan pengawasan, perluasan partisipasi masyarakat, serta penambahan alokasi anggaran menjadi langkah penting untuk menciptakan pengelolaan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan berkualitas di kawasan TNBTS.

4.3.4 Persepsi Biro wisata terhadap kenaikan tarif tiket TNBTS

Pelaku biro wisata menyebutkan bahwa kenaikan tiket pada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang diperlakukan secara tiba-tiba berdasarkan PP No 36 Tahun 2024 sempat membuat beberapa pihak terkejut, khususnya para penyedia layanan wisata atau biro *tour and travel* yang telah sejak lama menguntungkan operasional mereka pada konsistensi harga dan keteraturan informasi dari pihak pengelola. Para pelaku biro wisata mengaku bahwa tidak pemberitahuan resmi yang dikeluarkan itu sangat mendadak dan tidak ada sosialisasi dahulu sebelumnya yang melibatkan para pelaku biro wisata.

Pelaku biro wisata juga menyebutkan bahwa mereka mengetahui informasi kenaikan harga hanya dari media sosial bukan melalui komunikasi formal seperti

diadakan rapat pertemuan pelaku usaha. Situasi ini menimbulkan kekaacauan operasional, Teruma karena banyak biro wisata sudah memasarkan paket wisata Bromo dengan harga lama, termasuk memasukkan harga tiket masuk yang lama ke dalam rincian biaya paket tur. Akibatnya, saat tarif naik secara mendadak, mereka harus menanggung selisih biaya yang membuat kerugian secara finansial karena sebagian besar konsumen menuntut harga sesuai dengan perjanjian awal.

Ketiadaan komunikasi antara pengelola kawasan dan biro wisata menimbulkan persepsi bahwa pelaku usaha lokal tidak dianggap sebagai bagian dari ekosistem wisata Bromo, meskipun kontribusi mereka sangat besar dalam mendatangkan wisatawan ke kawasan tersebut. Oleh karena itu, pelaku biro wisata berharap agar kedepannya setiap kebijakan yang berdampak langsung pada operasional lapangan dapat melibatkan mereka secara partisipatif, baik dalam bentuk sosialisasi ataupun pemberitahuna resmi jauh hari sebelum kebijakan diberlakukan.

Sosialisasi pada dasarnya merupakan aktivitas yang dijalankan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas sebagaimana diamanatkan dalam suatu kebijakan. Aktor yang dimaksud umumnya adalah aparatur pemerintah yang secara legal dan formal diberi kewenangan serta memiliki keterikatan terhadap kebijakan tersebut. Mereka bisa saja merupakan pihak yang turut serta dalam proses perumusan kebijakan pada tahap formulasi, pihak yang secara khusus ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, ataupun pihak yang nantinya akan berperan langsung dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok sasaran, memperoleh pemahaman yang jelas mengenai substansi kebijakan yang telah ditetapkan.

Sosialisasi juga bermakna sebagai proses penyebarluasan informasi mengenai isi dan pokok-pokok kebijakan. Tahap ini penting karena menjabarkan secara detail substansi kebijakan agar dapat dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Kejelasan, kerincian, serta keterpahaman informasi yang diberikan sangat menentukan sejauh mana aktor-aktor terkait memiliki pengetahuan yang cukup dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen berikutnya yang tidak kalah penting adalah keberadaan

kelompok sasaran atau *target group*. Kelompok inilah yang menjadi objek penerapan kebijakan dan sekaligus faktor penentu efektivitas kebijakan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tujuan dibuatnya kebijakan adalah untuk merespons, mengatasi, ataupun memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kelompok sasaran tersebut.

Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi kebijakan adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang isi dan arah kebijakan kepada para pihak yang terlibat. Dengan adanya pemahaman tersebut, setiap aktor yang berkepentingan dapat mengetahui kedudukan, fungsi, serta peran masing-masing, sehingga diharapkan mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pelaksanaan kebijakan. Terakhir, sosialisasi juga diharapkan menghasilkan respons positif berupa keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan. Melalui proses transfer informasi yang jelas, para aktor akan ter dorong untuk memiliki sikap yang lebih sadar, bertanggung jawab, serta berkomitmen dalam menyukseskan kebijakan sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing.

Sebagai dampak dari pengalaman tersebut, para pelaku biro wisata menuntut pihak Balai Besar TNBTS untuk melakukan perubahan dalam pola komunikasi yang lebih inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan TNBTS, terutama pelaku usaha pariwisata lokal yang selama ini menjadi peran penting dalam memasarkan kunjungan wisata.

Komunitas mobil Jeep di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mengeluhkan kenaikan tarif masuk wisata Gunung Bromo. Kenaikan ini menyebabkan penurunan wisatawan ke destinasi wisata unggulan di Jawa Timur tersebut hingga penyewa kendaraan otomatis menurun. Menurut komunitas jeep yang biasa sebagai kendaraan sewa bagi wisatawan yang menuju wisata alam Gunung Bromo dari wilayah Kabupaten Malang, yakni Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, banyak wisatawan yang sudah booking tiket, namun dibatalkan akibat adanya kenaikan tarif masuk ke gunung tersebut.

Aksesibilitas di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menurut biro wisata memiliki peranan yang sangat krusial dalam menunjang

keberlangsungan aktivitas pariwisata. Dari sudut pandang biro wisata, aksesibilitas tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan jalur transportasi menuju destinasi, tetapi juga mencakup aspek keteraturan, kenyamanan, serta efisiensi perjalanan yang dialami oleh wisatawan. Biro wisata juga mengidentifikasi beberapa kendala, di antaranya adalah keterbatasan kapasitas jalur yang menyebabkan kemacetan pada musim liburan, ketidak disiplinan sebagian pengemudi dalam mengatur parkir maupun arus kendaraan, serta keterbatasan fasilitas pendukung seperti area pemberhentian resmi, rambu penunjuk arah, dan sarana keselamatan. Oleh karena itu, biro wisata menekankan pentingnya adanya koordinasi yang lebih intensif antara Balai Besar TNBTS, kelompok paguyuban jeep, serta asosiasi biro perjalanan dalam mengatur sistem transportasi dan aksesibilitas secara terpadu. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, aksesibilitas di kawasan TNBTS tidak hanya akan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan, tetapi juga meningkatkan citra destinasi sebagai kawasan wisata alam yang tertata dengan baik, aman, dan berkelanjutan.

Fasilitas umum di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menurut pandangan biro wisata menjadi aspek penting yang menentukan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Biro wisata menilai bahwa ketersediaan fasilitas dasar seperti area parkir, toilet umum, jalur pejalan kaki, hingga kios makanan dan oleh-oleh merupakan elemen yang sangat memengaruhi kepuasan wisatawan. Meskipun kawasan TNBTS memiliki daya tarik utama berupa panorama alam, biro wisata melihat bahwa keterbatasan fasilitas penunjang masih menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Jumlah toilet yang terbatas di beberapa titik destinasi utama seperti Penanjakan, Bukit Cinta, dan area Lautan Pasir sering menimbulkan antrean panjang, terutama saat musim liburan. Hal ini diperparah dengan kondisi beberapa fasilitas yang kurang terawat, sehingga menimbulkan keluhan dari wisatawan. Selain itu, biro wisata juga menyoroti aspek kenyamanan dan keamanan, seperti keterbatasan penerangan jalan pada malam hari, belum adanya fasilitas khusus bagi wisatawan lansia atau penyandang disabilitas, serta kurangnya tempat istirahat yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa biro wisata, kemacetan dan ketidakteraturan jalur lalu lintas di kawasan TNBTS dipandang sebagai salah satu kendala utama yang memengaruhi kualitas pelayanan wisata. Menurut narasumber, kepadatan kendaraan, khususnya jeep yang menjadi transportasi khas menuju spot utama seperti Penanjakan, seringkali menimbulkan kemacetan parah, terutama pada musim liburan dan akhir pekan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya ketertiban sebagian sopir yang tidak mematuhi aturan arus lalu lintas dan parkir, sehingga menimbulkan tumpukan kendaraan di jalur sempit menuju kawasan wisata. narasumber menilai bahwa situasi ini tidak hanya mengurangi kenyamanan wisatawan, tetapi juga berdampak pada citra destinasi secara keseluruhan karena wisatawan merasa perjalanan menuju lokasi utama terlalu melelahkan. Selain itu, kemacetan yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi jadwal paket wisata yang mereka tawarkan, sebab keterlambatan mencapai titik *sunrise* di Penanjakan menjadi salah satu komplain yang sering mereka terima dari pelanggan. Oleh karena itu, biro wisata menekankan pentingnya pengaturan arus lalu lintas yang lebih terstruktur, koordinasi yang kuat antara pengelola taman nasional dan komunitas sopir jeep, serta peningkatan fasilitas pendukung seperti area parkir dan jalur alternatif.

Dilihat dari sudut pandang biro wisata, fasilitas yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung, tetapi juga berperan dalam meningkatkan nilai jual paket wisata karena wisatawan cenderung memilih destinasi yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan. Oleh karena itu, biro wisata mendorong adanya peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas melalui kolaborasi antara Balai Besar TNBTS, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Dengan pengelolaan fasilitas yang lebih baik dan berkelanjutan, TNBTS dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menjamin kenyamanan serta kepuasan wisatawan selama berkunjung.

Pengelolaan ekowisata dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau berdasarkan peran tertentu yang diberikan. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan kawasan konservasi, baik daratan maupun lautan, yang memiliki keaslian dan keanekaragaman ekosistem yang khas, mencakup flora,

fauna, geomorfologi, serta aspek budaya. Kawasan ini juga memiliki nilai estetika yang penting bagi kepentingan publik, nasional, maupun sebagai warisan alam internasional. Pengelolaan kawasan ini bertujuan untuk konservasi sumber daya alam, penelitian, pendidikan lingkungan, pariwisata, dan rekreasi (Basuni, 1987).

Pelaku biro wisata juga mengungkapkan harapan besar agar kenaikan tarif tiket ini diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas umum di Kawasan Gunung Bromo yang hingga saat ini dinilai masih kurang dan tidak sebanding dengan harga tiket yang cukup tinggi. Beberapa keluhan yang disampaikan adalah perihal fasilitas toilet yang minim, tidak ada pelebaran jalan, pembatas jalan yang minim, kurangnya lampu penerangan jalan dan juga sistem *booking online* yang dianggap belum siap dan membuat kemacetan di area masuk Gunung Bromo terutama saat musim liburan akhir pekan karena fasilitas *scan barcode* tiket yang masih minim.

Pandangan biro wisata, kenaikan tarif seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga menjadi salah satu alat untuk perbaikan layanan dan infrastuktur agar wisatawan juga mendapatkan pengalaman yang sepadan dengan biaya yang mereka keluarkan. Jika kedepannya tidak ada perubahan maupun perbaikan fasilitas umum dikhawatirkan wisatawan akan merasa kecewa dan menurunkan minat untuk berkunjung yang pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan bisnis biro wisata dan sektor ekonomi lokal secara umum.

4.3.5 Persepsi wisatawan terhadap kenaikan tarif di TNBTS

Kebijakan tarif masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang diberlakukan melalui PP No 39 Tahun 2024 memberikan respons yang beragam, namun para narasumber menyatakan bahwa mereka memahami dan menerima kebijakan tersebut selama tujuannya adalah untuk pelestarian ekowisata, pembatasan agar tidak merusak lingkungan dan berdampak positif terhadap konservasi lingkungan. Para narasumber menyatakan bahwa mereka tidak keberatan membayar lebih mahal selama tarif yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk menjaga kelestarian alam, mengendalikan jumlah pengunjung agar tidak terjadi *overcapacity*, serta memperbaiki kualitas lingkungan secara

keseluruhan. Wisatawan yang memiliki kesadaran ekologis bahkan menilai bahwa tarif yang lebih tinggi dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk mengurangi tekanan massal terhadap kawasan konservasi, sekaligus mendidik publik agar lebih menghargai nilai penting dari keaslian alam dan keseimbangan ekosistem.

Selain tarif yang lebih tinggi, para wisatawan juga menyoroti persoalan infrastruktur yang belum memadai, terutama di kawasan penanjakan, salah satu spot favorit wisatawan untuk menikmati pemandangan matahari terbit.

Kemacetan sering terjadi, terutama saat musim liburan, yang membuat pengalaman wisatawan menjadi kurang nyaman. Akses jalan yang terbatas dan kurangnya fasilitas parkir juga menjadi masalah tersendiri. Banyak pihak berharap agar perbaikan infrastruktur ini menjadi perhatian pengelola TNBTS, terutama demi memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang rela datang dari berbagai daerah untuk menikmati keindahan alam Bromo.

Gunung Penanjakan menjadi salah satu destinasi unggulan di kawasan Resort PTN Penanjakan karena letaknya yang strategis pada ketinggian 2.770 mdpl, lebih tinggi dari Gunung Bromo yang berada di ketinggian 2.329 mdpl. Kondisi tersebut menjadikan Penanjakan sebagai titik pandang terbaik untuk menyaksikan matahari terbit dan panorama lanskap Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Berdasarkan keterangan Kepala Resort Wonokitri, sejak ditetapkannya SK 85, Penanjakan ditunjuk sebagai view point utama. Namun, seiring meningkatnya jumlah kunjungan, daya tampung Penanjakan tidak lagi mencukupi sehingga diperlukan pengembangan titik pandang alternatif. Meskipun demikian, Penanjakan tetap dianggap sebagai spot utama karena keunggulan lokasi dan tingginya daya tarik wisata.

Peningkatan kunjungan ini juga dipengaruhi oleh penetapan Bromo Tengger Semeru sebagai salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata prioritas nasional. Akan tetapi, lonjakan wisatawan di Penanjakan 1 menimbulkan persoalan kepadatan yang berdampak pada kenyamanan pengunjung. Untuk mengatasi masalah tersebut, Balai Besar TNBTS kemudian membuka spot pendukung berupa Bukit Kingkong yang diresmikan pada tahun 2013 dengan ketinggian 2.689 mdpl serta Bukit Cinta pada ketinggian 2.542 mdpl dengan dua puncak luas untuk menampung wisatawan.

Meskipun menjadi alternatif, fasilitas pendukung di Bukit Cinta masih terbatas, seperti ketiadaan toilet, jalur setapak yang belum diperkeras, serta kondisi akses yang kurang ramah bagi anak-anak maupun lansia, sehingga memengaruhi kenyamanan wisata. Selain kepadatan di titik pandang, permasalahan juga muncul dari kemacetan kendaraan jeep yang dikelola masyarakat lokal. Kurangnya ketertiban dalam parkir dan pergerakan kendaraan menyebabkan arus lalu lintas terganggu.

Kenaikan tarif tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seharusnya diiringi perbaikan fasilitas, pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat lokal di Bromo. Transparansi harga juga harus dilakukan agar wisatawan merasa bahwa harga yang di bayarkan sepadan dengan kualitas yang wisatawan dapatkan. Pentingnya edukasi terhadap wisatawan juga seharusnya di lakukan oleh Pengelola TNBTS untuk memberikan kesadaran menjaga kelestarian Gunung Bromo terutama dengan adanya tarif lebih tinggi, hal ini diharapkan dapat mengurangi perilaku wisatawan yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pada kasus-kasus sebelumnya.

Aksesibilitas menjadi salah satu aspek penting yang sangat menentukan kualitas pengalaman wisatawan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas wisatawan menilai bahwa akses menuju lokasi wisata relatif mudah dijangkau karena telah tersedia jalur transportasi darat yang memadai, baik melalui kendaraan pribadi maupun kendaraan sewa seperti jeep yang dikelola oleh masyarakat lokal. Namun demikian, meskipun akses utama terbilang cukup terbuka, wisatawan juga mengungkapkan adanya beberapa kendala yang dirasakan. Salah satunya adalah kondisi jalan yang menanjak, berkelok, serta pada beberapa titik masih sempit sehingga berpotensi menimbulkan kemacetan, terutama saat musim liburan atau akhir pekan ketika kunjungan wisatawan melonjak

Fasilitas yang tersedia di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kenyamanan dan kepuasan selama berwisata. Banyak wisatawan mengapresiasi adanya layanan transportasi jeep lokal, homestay yang dikelola masyarakat, serta warung makan tradisional

yang memberikan pengalaman otentik. Akan tetapi, mereka juga sering kali menyampaikan kritik terhadap keterbatasan jumlah toilet umum, minimnya tempat istirahat, serta kurangnya papan petunjuk informasi yang jelas di beberapa titik wisata. Kondisi ini menyebabkan sebagian wisatawan merasa kesulitan dalam mengakses fasilitas dasar, terutama pada musim liburan ketika jumlah pengunjung meningkat tajam. Selain itu, wisatawan juga menyoroti aspek kebersihan fasilitas yang dinilai belum terjaga dengan baik, misalnya keberadaan sampah di sekitar spot populer maupun area parkir jeep yang padat. Dari sudut pandang wisatawan, fasilitas yang memadai tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga mencerminkan kualitas pengelolaan destinasi wisata secara keseluruhan. Oleh karena itu, mereka mengharapkan adanya peningkatan fasilitas yang lebih inklusif. Dengan demikian, penyediaan fasilitas yang berkualitas akan memperkuat citra TNBTS sebagai destinasi wisata berkelas dunia sekaligus meningkatkan loyalitas wisatawan untuk kembali berkunjung di masa mendatang.

Kemacetan dan ketidak teraturan jalur lalu lintas di kawasan TNBTS menjadi salah satu pengalaman yang cukup mengganggu selama kunjungan. Banyak wisatawan menyampaikan bahwa antusiasme mereka untuk menikmati keindahan panorama Bromo, khususnya momen *sunrise* di Penanjakan, seringkali berkurang akibat lamanya waktu yang dihabiskan dalam antrean kendaraan. Jalur yang sempit dan padat, ditambah dengan perilaku sebagian sopir jeep yang tidak tertib dalam mematuhi arah arus lalu lintas, menyebabkan perjalanan terasa melelahkan dan kurang menyenangkan. Wisatawan juga menilai bahwa kondisi lalu lintas yang kurang teratur menciptakan suasana tidak nyaman. Selain itu, kemacetan yang berkepanjangan membuat wisatawan kehilangan momen untuk menyaksikan *sunrise*, yang justru menjadi daya tarik utama kunjungan ke Bromo. Beberapa wisatawan menganggap permasalahan ini mencerminkan kurangnya pengelolaan transportasi yang efektif di kawasan wisata kelas dunia seperti TNBTS. Oleh sebab itu, mereka berharap adanya regulasi lalu lintas yang lebih tegas, pengaturan parkir yang lebih terstruktur, serta koordinasi yang lebih baik antara pihak pengelola taman nasional dan komunitas sopir jeep.

Harapan wisatawan terhadap peningkatan fasilitas umum juga meningkat seiring dengan naik tarif. Beberapa pengunjung mengeluhkan bahwa meskipun harga tiket masuk telah mengalami kenaikan signifikan, fasilitas dasar seperti toilet umum masih terbatas, dalam kondisi kurang bersih dan bahkan tetap dikenakan biaya tambahan. Hal ini dianggap tidak adil, mengingat para wisatawan telah membayar cukup mahal untuk memasuki kawasan tersebut. Selain itu, beberapa wisatawan juga menyayangkan kurangnya papan petunjuk jalan bagi mereka yang berkunjung ke Bromo menggunakan kendaraan roda 2 dan kurangnya penerangan jalan. Kenaikan tarif seharusnya bersamaan dengan peningkatan standar pelayanan, agar pengalaman berwisata tetap menyenangkan dan sepadan dengan biaya yang dikeluarkan. Pemerintah diharapkan konsisten dalam meningkatkan kualitas wisata Bromo agar sejalan dengan visi menjadikan Bromo sebagai objek wisata unggulan Jawa Timur.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis persepsi *stakeholder* terhadap kenaikan harga tiket masuk di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang berbeda bagi setiap pihak. Kenaikan tiket yang didasarkan pada regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024, merupakan tindak lanjut dari kebijakan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, yang menjadi landasan awal penetapan tarif. Dari sisi pengelola TNBTS, kebijakan ini dipandang sebagai sebuah kewajiban administratif karena mereka hanya menerapkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat tanpa ruang untuk melakukan penyesuaian secara mandiri. Bagi *stakeholder* kedua, yaitu biro wisata, kebijakan ini menimbulkan permasalahan karena dianggap terlalu mendadak dan minim sosialisasi. Hal ini berdampak pada kerugian ekonomi di awal, mengingat banyak biro sudah menyusun paket wisata dengan harga tiket lama sehingga tidak sejalan dengan tarif baru yang berlaku. Sementara itu, wisatawan sebagai *stakeholder* terakhir justru cenderung memberikan respon yang lebih positif. Mereka memahami bahwa kenaikan harga tiket merupakan upaya untuk mendukung konservasi hutan dan menjaga kelestarian ekosistem kawasan, meskipun mereka juga menekankan bahwa peningkatan harga harus diimbangi dengan perbaikan fasilitas, pelayanan, serta kenyamanan dalam berwisata.

saran yang dapat diberikan adalah perlunya perencanaan dan sosialisasi yang lebih matang sebelum kebijakan kenaikan tiket diberlakukan. Pemerintah bersama Balai Besar TNBTS perlu melakukan komunikasi intensif dengan biro wisata agar penyesuaian harga tidak menimbulkan kerugian ekonomi dan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Selain itu, transparansi penggunaan dana dari hasil kenaikan tiket perlu ditingkatkan, terutama dalam hal peningkatan kualitas fasilitas wisata, infrastruktur, serta program konservasi yang nyata, sehingga wisatawan dapat merasakan manfaat langsung dari kontribusi mereka. Dengan demikian, kebijakan kenaikan tiket tidak hanya dilihat sebagai beban tambahan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan kawasan

TNBTS serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfunnimah, L., & Khalid, J. (2022). Pengaruh Persepsi Harga, Lokasi dan Promosi Terhadap Keputusan Menginap di Hotel Horison Bekasi. *Human Capital Development*, 9(2), 1-15.
- Alim, S., & Muhtarom, Z. A. (2023). Persepsi Wisatawan Tentang Kualitas Kenyamanan (Studi Kasus di Kawasan Mandalika). MUSLIMPRENEUR: Jurnal Ekonomi dan Kajian Keislaman, 3(1), 1-21.ISO 690
- Alvianna, S. (2017). Peran Biro Perjalanan Wisata Sunrise Holiday Tour & Travel Dalam Meningkatkan Minat Wisata Ke Gunung Bromo. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 2(2), 10-10.
- Ardiansyah, I., & Mulia, B. (2019). Pengaruh harga dan fasilitas terhadap keputusan berkunjung wisatawan di taman impian jaya ancol Jakarta dengan metode structural equation modeling. *Media Bina Ilmiah*, 14(3), 2235-2248.
- Hariawan, J., Abdillah, Y., & Hakim, L. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya. *Profit: Jurnal Adminsitrasi Bisnis*, 14(2), 104-114.
- Idwar, W. A., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). PERAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU SEBAGAI PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN WISATA DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(06), 75-80.
- Isnain, W. (2016). Harga optimal tiket masuk wisata alam Bantimurung, Sulawesi Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 13(3), 155-163.
- Kementerian Pariwisata: Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM. 15/KU.101/MP/2017-<http://www.kemenpar.go.id/post/keputusan-menteri-pariwisata-nomor-km-15ku101mp2017>
- Khansa, V. R., & Farida, N. (2016). Pengaruh harga dan citra destinasi terhadap niat berkunjung kembali melalui kepuasan (studi pada wisatawan domestik Kebun Raya Bogor). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(4), 104-114.
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong.2008. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 2*.
Jakarta: Erlangga
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. 2009. *Marketing Management, Thirteenth Edition*.
Jakarta: Erlangga
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). Persepsi. *KOLONI*, 2(4), 213-226.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
- Rahmadayanti, T., & Murtadlo, K. (2020). Pengaruh Efektivitas Media Sosial, Daya Tarik, Harga Tiket, dan Fasilitas Pelayanan Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung di Curug Goa Jalmo Kabupaten Pasuruan. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 125-136.
- Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

- Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang – <http://disparbud.malangkab.go.id/2/Renstra%20DISPARBUD.pdf>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Rosida, F. (2018). Pengaruh Harga dan Fasilitas Terhadap Kunjungan Wisata di Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Sari, L., & Sitorus, N. I. B. S. (2021). Kolaborasi Stakeholder Pariwisata dalam Pengelolaan Akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 467081.
- Sempat Ditutup Karena Pandemi, Omzet Wisata Gunung Bromo dan Semeru Anjlok, (2021). <https://www.kompas.tv/regional/181689/sempat-ditutup-karena-pandemi-omzet-wisata-gunung-bromo-dan-semeru-anjlok>
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. Cetakan ke-19 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Wulandari, R. (2022). Persepsi Wisatawan Terhadap Objek Wisata Umbul Ponggok. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 3(1), 71-90.
- Yandi, A., Mahaputra, M. R., & Mahaputra, M. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Kunjungan Wisatawan (Literature Review). *Jurnal Kewirausahaan Dan Multi Talenta*, 1(1), 14-27.ISO 690
- Yoeti, O. (2006). Perencanaan Strategi Daerah Tujuan Wisata. *Angkasa*, Bandung.
- Yona Julia Aprina, “Persepsi Pengunjung Terhadap Destinasi Wisata Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampara” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara untuk Informan Balai Besar

Saya Nabilla Zahra, mahasiswa program studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Veteran Jawa Timur ingin melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul “Analisis Persepsi *Stakeholder* terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”.

A. Profil Informan

B. Daftar Pertanyaan

1. Latar belakang kebijakan kenaikan harga di TNBTS?
2. Sejak kapan diberlakukan kebijakan kenaikan harga di TNBTS?
3. Apakah ada kajian terlebih dahulu terkait kebijakan kenaikan harga di TNBTS?
4. Bagaimana persepsi pihak Balai Besar terkait kebijakan PP Nomer 39 Tahun 2024?
5. Bagaimana perencanaan atau pelaksanaan kebijakan PP Nomer 39 Tahun 2024?
6. Apa dampak yang terjadi setelah diberlakukannya kebijakan PP Nomer 39 Tahun 2024?
7. Apa tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut?
8. Apa harapan pengelola terhadap kebijakan PP Nomer 39 Tahun 2024 pada TNBTS

Lampiran 2. Pedoman Wawancara untuk Informan Biro Wisata

Saya Nabilla Zahra, mahasiswa program studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Veteran Jawa Timur ingin melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul “Analisis Persepsi *Stakeholder* terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”.

A. Profil Informan

Nama informan

Nama biro wisata

Jabatan

B. Daftar Pertanyaan

1. Apakah informan mengetahui terkait kenaikan harga di TNBTS
2. Apakah informan mengetahui alasan kenaikan harga di TNBTS?
3. Darimana informan mengetahui kenaikan harga tiket di TNBTS?
4. Bagaimana pendapat informan terhadap kenaikan harga tiket di TNBTS?
5. Apakah informan setuju apabila kenaikan harga di TNBTS diberlakukan untuk alasan konservasi dan pembatasan pengunjung?
6. Apakah menurut anda kebijakan ini sudah sebanding dengan fasilitas atau layanan yang ada di TNBTS?
7. Apakah terjadi penurun minat wisatawan pada saat kenaikan harga tiket di TNBTS?
8. Apa dampak operasional yang terjadi saat diberlakukannya kebijakan PP Nomor 39 Tahun 2024.
9. Apakah pihak Balai Besar TNBTS melibatkan pihak biro wisata saat menerapkan kebijakan tersebut?
10. Apa harapan bapak/ibu kepada pihak pengelola maupun pemerintah terkait kebijakan tarif yang baru?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Wisatawan.

Saya Nabilla Zahra, mahasiswa program studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Veteran Jawa Timur ingin melakukan wawancara terkait skripsi saya yang berjudul “Analisis Persepsi *Stakeholder* terhadap kenaikan tiket di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru”.

A. Profil Informan

Nama

Usia

Asal daerah

Pekerjaan

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa alasan utama anda mengunjungi TNBTS?

2. Bagaimana kesan anda terhadap fasilitas, layanan dan pengeloaan kawasan nasional Bromo Tengger Semeru?
3. Apakah anda mengetahui bahwa terjadi kenaikan harga tiket di TNBTS?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai kenaikan harga tiket tersebut?
5. Apakah menurut anda harga tiket sudah sebanding dengan fasilitas maupun pengalaman yang anda dapatkan?
6. Bagaimana pendapat anda jika kenaikan harga tiket di TNBTS diberlakukan untuk konservasi hutan dan juga pembatasan pengunjung agar tidak terjadi *overtourism* ?
7. Apakah anda bersedia membayar lebih mahal jika pendapatan dari tiket digunakan untuk konservasi dan pelestarian lingkungan?
8. Apa saran anda kepada pihak pengelola atau Balai Besar terkait kebijakan tersebut?
9. Apa harapan anda terkait kebijakan kenaikan harga di TNBTS

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan di Balai Besar TNBTS



